



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG**

**RENCANA STRATEGIS  
( RENSTRA )**

**TAHUN 2018-2023**

**BPBD, KESBANGPOL  
KOTA PADANG PANJANG**

## DAFTAR ISI

Daftar Isi .....	i	
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....		1
1.2 Landasan Hukum .....		8
1.3 Maksud dan Tujuan.....		10
1.4 Sistematika Penulisan .....		11
<b>BAB II</b>	<b>: GAMBARAN PELAYANAN BPBD, KESBANGPOL</b>	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang .....		13
2.2 Suber Daya BPBD, Kesbangpol.....		24
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.....		35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD, Kesbangpol .....		52
<b>BAB III</b>	<b>: ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang. ....		57
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....		60
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Renstra BNPB .....		63
3.4. Telaahan terhadap rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan Hidup Strategis		65
3.5. Penentuan isu-isu strategis		65
<b>BAB IV</b>	<b>: TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang.		67
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.</b>	68

<b>BAB VI</b>	<b>: RENCANA PROGRAM, KEGIATAN BPBD,</b>	<b>69</b>
	<b>KESBANGPOL KOTA PADANG PANJANG 2018-2023</b>	
	<b>DAN INDIKATOR PENDANAAN</b>	
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
	<b>7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu</b>	<b>72</b>
	<b>Pada Tujuan dan sasaran RPJMD</b>	
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>76</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi dari bencana adalah: peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari definisi tersebut diketahui bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis yaitu: bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan transportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia lebih disebabkan karena konflik antar manusia dalam perebutan sumber daya yang terbatas, konflik satwa, alasan ideologi, agama, dan politik. Bencana-bencana tersebut dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksikan sehingga sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan khususnya dalam hal ini pemerintah untuk menyusun sebuah perencanaan yang komprehensif dan terpadu untuk merencanakan langkah-langkah atau upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana, melaksanakan tanggap darurat bencana saat bencana terjadi, maupun untuk melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan demografis wilayah Kota Padang Panjang juga berimplikasi pada kemunculan potensi kerawanan terhadap bencana yang cukup tinggi. Selain itu, seiring dengan

berjalanya waktu dengan munculnya globalisasi bagi masyarakat Kota Padang Panjang, serta bermuara pada lahirnya sistem sosial politik yang dinamis dan unik, maka jika tata kelolanya kurang bijaksana akan lebih membuat suasana menjadi semakin labil dan dapat menjerumus Kota Padang Panjang kedalam situasi yang tidak menguntungkan dan secara langsung atau tidak langsung dapat berkontribusi terhadap munculnya potensi konflik sosial (bencana non alam).

Setelah Padang Panjang dilanda bencana gempa bumi dan tsunami tanggal 26 Desember 2004, memberi pengalaman yang sangat bermanfaat kepada kita semua tentang hal yang terkait dengan penanggulangan bencana. Keterlibatan para pihak sangat mewarnai tatakelola kebencanaan. Baik dari aspek pengelolaan bantuan darurat bencana maupun rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pengalaman tersebut juga telah menggiring kita semua untuk berpikir lebih komprehensif apa yang seharusnya disiapkan pada saat aman atau ketika sedang tidak terjadi bencana, baik dilakukan oleh pemerintah secara otonom, bersama-sama masyarakat dan bahkan oleh masyarakat secara mandiri.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Padang Panjang diupayakan bergeser dari upaya-upaya responsif menuju arah preventif dengan membuka ruang serta waktu seluas luasnya bagi keterlibatan inklusi masyarakat sebagai penerima manfaat. Usaha untuk mewujudkan perubahan paradigma tersebut, menjadi sebuah harapan pengurangan risiko bencana dan atau peningkatan kapasitas ketahanan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menghadapi bencana.

Selanjutnya, salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Padang Panjang Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (BPBD KESBANGPOL Kesbangpol Kota Padang Panjang) perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Segenap jajaran aparatur BPBD, KESBANGPOL Kesbangpol dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen rencana strategis (renstra).

Pemerintah Kota Padang Panjang menyadari pentingnya penanggulangan bencana untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, serta mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Padang Panjang maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka sebagai tindak lanjutnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD, Kesbangpol) Kota Padang Panjang selaku salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah Pemerintah Kota Padang Panjang wajib pula menyusun Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang untuk kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Hal ini secara gamblang dapat dibaca dan terukur melalui indikator-indikator pengurangan risiko bencana dalam agenda pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023. Dimana sebuah perencanaan strategis dapat memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang *Specific* (jelas), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat tercapai), *Relevant* (sesuai), dan *Time Bound* (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target-target RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018–2023.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, maka arah kebijakan pengurangan risiko bencana dilaksanakan dengan secara terpadu antara upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak. Sehingga mampu mensinergikan upaya pengurangan risiko bencana hingga menembus lapisan-lapisan masyarakat di tingkat pemerintahan gampang dan mandiri. Dengan demikian menjadi harapan kita semua bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan berbagai kegiatan, dengan sasaran yang jelas dan indikator yang terukur (kuantitatif/kualitatif). Untuk itulah Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kesbangpol ini dirumuskan. Sehingga kebijakan, strategi, program, dan kegiatan dikonstruksikan atas tujuan, sasaran dan indikator yang realistis sebagai komitmen dukungan terhadap visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang pada Pilar Ke-4 “*Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*” khususnya sektor Penanggulangan bencana serta Kesatuan Bangsa dan Politik 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra BPBD, Kesbangpol periode 2018–2023, merupakan *road map* utama bagi pejabat eselon II, III, IV dan seluruh staf di lingkungan OPD BPBD, Kesbangpol dalam mewujudkan cita-cita Pemerintah Kota Padang Panjang periode 2018–2023 dalam usaha untuk *Meningkatnya*

*Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan* (misi ke-1), dengan konsep rendah risiko bencana, serta pemahaman politik masyarakat, wawasan kebangsaan, Pemberantasan pekat dan menjaga stabilitas politik di Kota Padang Panjang.

Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018–2023 yang dituangkan didalam Peraturan Walikota Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023, yang merupakan dokumen perencanaan Kota Padang Panjang untuk periode lima tahunan dan merupakan penjabaran visi, misi Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Guna mengoperasionalkan dan menindaklanjuti program yang ada dalam RPJMD, maka Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahunan. Program dan Kegiatan dalam Renstra OPD harus sejalan dan berkaitan sehingga menjadi satu bahagian yang utuh dengan RPJMD, dengan demikian Renstra OPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang (BPBD Kesbangpol ) sebagai OPD yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan sub urusan bidang penanggulangan bencana serta kesatuan bangsa dan politik di daerah, maka rencana strategis BPBD Kesbangpol lima tahunan mendatang merupakan komitmen untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang yaitu ***“Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat”***.

Rencana Strategis BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang Tahun 2018–2023 adalah dokumen perencanaan yang mendukung visi, misi



Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, selanjutnya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima tahun kedepan melalui strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPBD Kesbangpol dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023.

Fungsi Renstra BPBD Kesbangpol adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan selama lima tahunan yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan sesuai dengan prioritas yang akan dicapai.

Penyusunan Rencana Strategis BPBD Kesbangpol berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengarah kepada RPJMD Tahun 2018–2023.

Adapun tahapan penyusunan Renstra BPBD Kesbangpol adalah:

1. Persiapan Penyusunan Renstra
2. Membentuk Tim Penyusun Renstra yang terdiri dari Ketua Tim, Sekretaris Tim dan Kelompok Kerja
3. Melakukan orientasi atau pengenalan Renstra kepada Tim Penyusun yang dilakukan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra
4. Menyusun agenda kerja sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran Kepala Daerah
5. Pengumpulan data dan informasi

## 6. Penyusunan Rancangan Renstra

Pada tahap penyusunan rancangan Renstra terdiri dari dua tahap yaitu :

### a) Tahap perumusan rancangan Renstra

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra sangat menentukan kualitas dokumen Renstra yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh OPD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi OPD. Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra yang dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari : Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan OPD, Review Renstra kementerian/lembaga dan Renstra OPD, penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Analisis terhadap dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi, perumusan isu-isu strategis, Perumusan visi dan misi OPD, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah SKPK, dan Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah OPD.

### b) Tahap Penyajian rancangan Renstra

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra OPD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra OPD.

### c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra OPD merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra OPD yang berpedoman pada RPJMD. Penyempurnaan Rancangan Renstra tersebut bertujuan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

### d) Penetapan Renstra

Rancangan akhir Renstra ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

e) Proses Penyusunan Renstra OPD

Renstra BPBD Kesbangpol merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Penyusunan Renstra BPBD Kesbangpol 2018-2023 berpedoman pada RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan penyusunan Renstra BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana;
6. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebangsaan dan Politik;
17. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengasurutamaan Gender dalam Pembnagunan Nasional;

18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana di Kota Padang Panjang;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
22. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang 2012-2032
23. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018– 2023;
24. Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana
25. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat
26. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra ini disusun dengan maksud sebagai roadmap dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang tahun 2018–2023 dari aspek penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam kurun waktu 2018–2023 yang akan dilaksanakan oleh BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menyediakan dokumen sebagai pedoman dalam penyusunan Renja BPBD Kesbangpol;
2. Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pemabngunan daerah;
3. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan bagi BPBD KESBANGPOL Kota Padang Panjang dan instansi terkait.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD KESBANGPOL
2.2	Sumberdaya BPBD KESBANGPOL
2.3	Kinerja Pelayanan BPBD KESBANGPOL
2.4	Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan BPBD KESBANGPOL
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1	Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V	Strategi dan Kebijakan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA  
PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG  
URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bpbd Kesbangpol**

Pelayanan penanggulangan bencana diselenggarakan dengan menggunakan manajemen penanggulangan, yang mencakup layanan sebelum terjadinya suatu bencana, pada saat terjadinya bencana dan layanan pada saat setelah terjadinya suatu kejadian bencana. Keseluruhan layanan tersebut dibingkai dalam upaya untuk adaptasi dan mitigasi bencana. Secara umum upaya-upaya adaptasi dan mitigasi yang menjadi kewenangan BPBD KESBANGPOL dalam menyelenggarakan layanan penanggulangan bencana difokuskan pada upaya-upaya yang bersifat non struktural.

Bencana, sebagai sebuah upaya maupun kegiatan yang secara dinamis melaksanakan fungsi-fungsi manajemen diseluruh tahapan penanggulangan bencana. Meliputi pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan menggunakan seluruh potensi yang tersedia baik struktural maupun non-struktural. Guna melindungi sebesar-besarnya masyarakat, dan berusaha menekan sekecil kecilnya korban akibat bencana alam, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi ancaman yang menimpanya serta dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Kota Padang Panjang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) melalui Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik yang mempunyai tugas : melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi: (a.) Pra bencana; (b.) Saat tanggap darurat; dan (c.) Pasca bencana serta yang berhubungan dengan Kesbangpoldagri dan Hubungan Antar lembaga di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.



BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan Prosedur Tetap Penanganan Bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPBD Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

3. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
4. Pengkoordinasian, pembinaan, pengembangan, pengawasan di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
5. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Tugas Unsur Pelaksana pada BPBD Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi :

a. Pra bencana

Pada situasi tidak terjadi bencana, bertugas:

1. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
2. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan risiko bencana;
3. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
4. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
6. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
7. Menyusun persyaratan analisis risiko bencana; dan
8. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pada situasi terdapat potensi bencana, bertugas melakukan:

1. Mitigasi;
2. Kesiapsiagaan; dan
3. Peringatan Dini

b. Tanggap Darurat

Saat tanggap darurat, bertugas:

- i. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;

1. Pencarian dan penyelamatan korban;
    2. Pertolongan darurat; dan
    3. Evakuasi korban dan harta benda.
  - ii. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
    1. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
    2. Pangan;
    3. Sandang;
    4. Pelayanan kesehatan;
    5. Pelayanan psikososial; dan
    6. Penampungan dan tempat hunian.
  - iii. Melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
    1. Penyuluhan agama;
    2. Penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
    3. Bimbingan dan konseling keagamaan; dan
    4. Pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah.
  - iv. Melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi;
    1. Pendataan;
    2. Penempatan pada lokasi yang aman;
    3. Pemenuhan kebutuhan dasar;
    4. Pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
    5. Pemberian bantuan santunan duka cita.
  - v. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
    1. Memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
    2. Mengganti kerusakan akibat bencana.
- c. Pasca Bencana  
Pasca bencana tugas BPBD Kesbangpol meliputi;
  - i. Rehabilitasi;
    1. Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
    2. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
    3. Perbaikan prasana dan sarana umum;
    4. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    5. Pemulihan sosial psikologis;

6. Pelayanan kesehatan;
  7. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  8. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
  9. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
  10. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  11. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- ii. Rekonstruksi
1. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  2. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  3. Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
  4. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
  5. Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
  6. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  7. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Selanjutnya Badan Penanggulangan Bencana daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang juga merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kota Padang Panjang.

BPBD Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah. Secara makro, kelembagaan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang terdiri atas 2 unsur, yaitu unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. Unsur pengarah merupakan unsur non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kesbangpol, beranggotakan sembilan orang yang terdiri dari lima orang dari unsur pejabat lembaga pemerintah daerah dan

empat orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli di daerah yang dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh DPRD. Unsur pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada BPBD Kesbangpol dalam penanggulangan bencana, dan mempunyai fungsi dalam penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, pemantauan dan pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sedangkan unsur pelaksana merupakan unsur struktural, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

#### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi pada saat pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana serta penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- b. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana termasuk pemadaman kebakaran;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pelaksanaan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan BPBD, Kesbangpol yang meliputi urusan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan dilingkungan BPBD, Kesbangpol;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan yang meliputi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, kehumasan, protokol, evaluasi, pelaporan dan peningkatan sumber daya manusia;
- c. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- d. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan diwilayahnya; dan
- e. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana, kesatuan bangsa dan politik.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

## **3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan

- kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan;
- b. Seksi Kesiapsiagaan.

#### **4. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. Komando penanganan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
4. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,

penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

5. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

1. Seksi Kedaruratan; dan
2. Seksi Logistik.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

## **5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan pada pasca bencana;
3. Pelaksanaan hubungan kerja dibidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
4. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi;
- b. Seksi Rekonstruksi;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.



## **5. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik**

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD, Kesbangpol dibidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program hubungan antar lembaga; dan
- penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

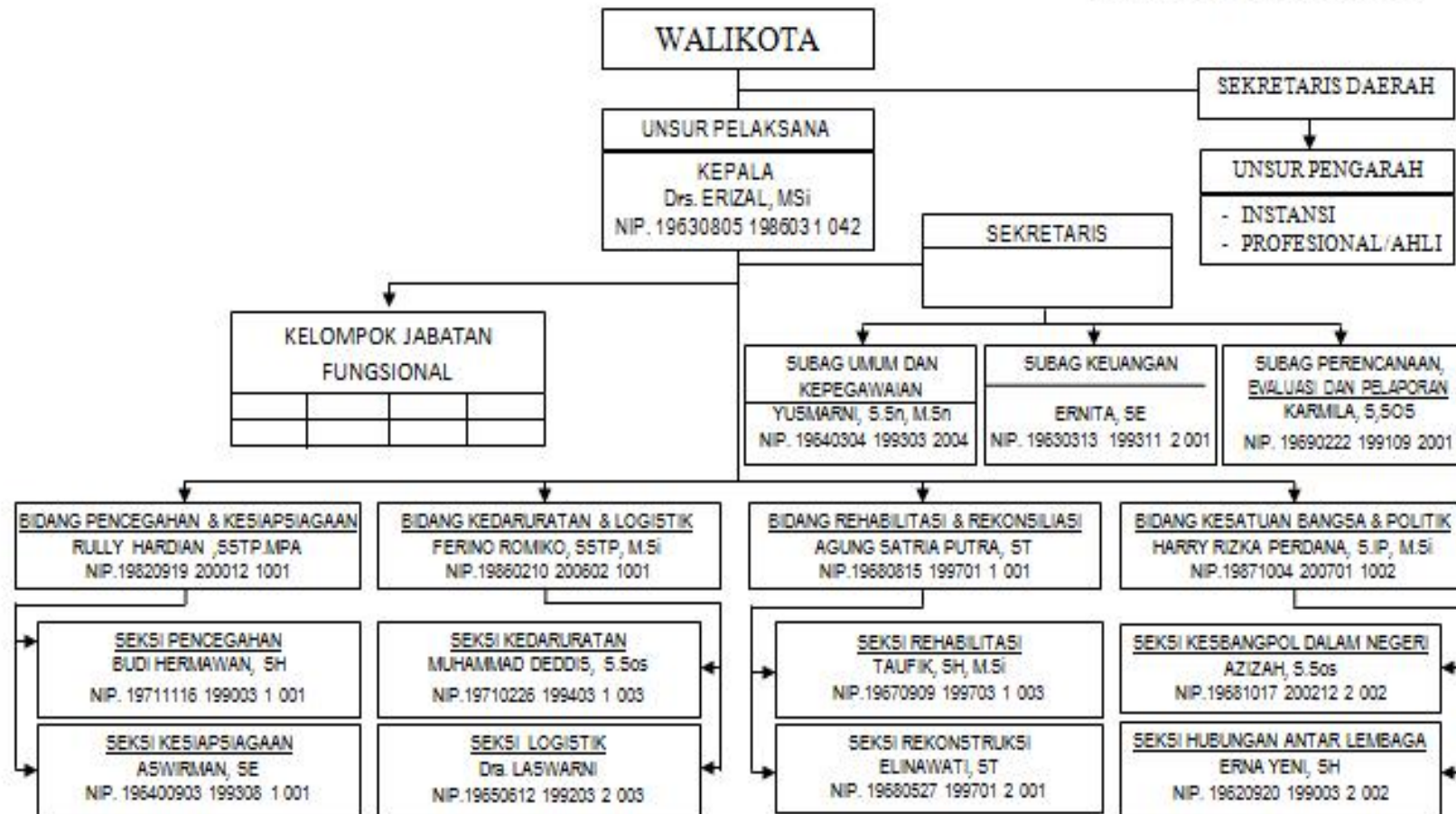
- a. Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun Struktur Organisasi BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah sebagaimana tergambar pada gambar berikut ini :

STRUTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010



## 2.2 Sumber Daya BPBD, Kesbangpol

BPBD, Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh 61 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :

### a. Data Pegawai

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang**

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pegawai Negeri Sipil	19 orang	13 orang
2.	Pegawai Harian Lepas	28 orang	1 orang
	Jumlah	47 orang	14 orang

**Tabel 2.2**  
**Tingkat Eselonering**

No	Eselonering	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Eselon II b	1 orang	-
2.	Eselon III a	-	-
3.	Eselon III b	4 orang	-
4.	Eselon IV a	4 orang	7 orang
	Jumlah	9 orang	7 orang

**Tabel 2.3**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Strata 2	5 orang	-
2.	Strata 1	8 orang	9 orang
3.	Diploma 3	-	2 orang
4.	SLTA	6 orang	2 orang
	Jumlah	19 orang	13 orang

**Tabel 2.4**  
**Tingkat Kepangkatan**

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Pembina Utama Muda / IV c	1 orang	-
2.	Pembina Tk. I / IV b	4 orang	1 orang
2.	Pembina / IV a	2 orang	1 orang
3.	Penata Tk. I / III d	4 orang	5 orang
4.	Penata / III c	1 orang	
5.	Penata Muda Tk. I / III b	1 orang	2 orang
6.	Penata Muda / III a	1 orang	2 orang
7.	Pengatur Tk. I / II d	1 orang	-
8.	Pengatur / II c	3 orang	1 orang
9.	Pengatur Muda Tk. I / II b	-	1 orang
10	Pengatur Muda / II a	-	-
11	Juru Tk. I / I d	-	-
12	Juru / I c	-	-
13	Juru Muda Tk. I / I b	-	-
14	Juru Muda / I a	-	-
15	Pegawai harian lepas	28 orang	1 orang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang di tunjang oleh sarana dan prasarana, yang berasal dari pengadaan dengan sumber dana dari APBD Kota Padang Panjang dan bantuan peralatan dari BNPB dan BPBD Propinsi Sumatera Barat, dimana aset (*assets*) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi dari aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, guna menunjang tercapainya kinerja pelayanan penanggulangan bencana dan urusan-urusan kesatuan

bangsa dan politik sesuai dengan standar dan kriteria yang berlaku, dengan gambaran sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Daftar Jenis Peralatan Penanggulangan Bencana pada BPBD**  
**Kesbangpol Kota Padang Panjang**

No	Jenis Peralatan yang dimiliki BPBD	Kuantitas	Kondisi saat ini	
			Baik	Rusak
1	Kendaraan roda 6	1 unit	√	
2	Kendaraan roda 4	7 unit	√	
3	Kendaraan roda 2	12 unit	7 unit	5 unit
5	PC	12 unit	√	
6	Laptop	8 unit	5 unit	3 unit
7	ALAT PENGHANCUR KERTAS	1 unit	√	
8	Meja Rapat	24 unit	√	
9	Meja Biro	19 unit	√	
10	Kursi Rapat	7 unit	√	
11	Kursi Tamu	2 unit	√	
12	Mesin Penghisap Debu	1 unit	√	
13	Televisi	4 unit	3 unit	1 unit
14	Sound System	1 unit	√	
15	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3 unit	√	
16	Mesin Pompa Air	1 unit	√	
17	Handy Cam	2 unit	√	
18	Racun Api ( Pemadam Kebakaran)	8 unit	√	
19	Tenda POSKO	1 Buah	√	--
20	Tenda PELETON	2 Buah	√	--
21	Tenda REGU	3 Buah	√	--
22	Tenda KELUARGA	5 Buah	4 Buah	1 Buah
23	Tenda KELUARGA Keong	5 Buah	2 Buah	3 Buah
24	Tenda PENGUNGS	2 Buah	√	--
25	RADIO RG	1 Set	√	--
26	RADIO SSB	1 Set	√	--
27	Automatic Antena tuner AT 30	1 Set	√	--
28	GENSET SK VA	2 Buah	√	--
29	WATER TREATMENT PORTABLE	2 Buah	√	--
30	MOTOR TRAIL	4 Unit	√	--
31	PERAHU KARET	2 Set	√	--
32	MESIN SINSO SEDANG	3 Buah	√	--
33	MESIN POTONG RUMPUT	1 Buah	√	--

34	KAPAK BESI	8 Buah	√	--
35	SKOP	7 Buah	√	--
36	CANGKUL	7 Buah	√	--
37	KERANJANG ROTAN	20 Buah	√	--
38	SOFTWARE APLIKASI CUACA, GEMPA	1 Set	√	--
39	ANTENA TIANG DIAMON S23	2 Buah	√	--
40	LANKIN RESCEU	1 Buah	√	--
41	TALI KARMANTEL STATIS DAN DINAMIS 10,5	4 Buah	√	--
42	PULLEY RESCUE PETZL	2 Buah	√	--
43	PULLEY TANDAM	4 Buah	√	--
44	PETZL ASCENDER KIRI	6 Buah	√	--
45	CARABINER AUTOLOCK BESI	19 Buah	√	--
46	CARABINER SNEP	12 Buah	√	--
47	FIGURE 8	5 Buah	√	--
48	GENSET HONDA	2 Buah	√	--
49	WIBBING	48 Buah	√	--
50	UPS	2 Buah	√	--
51	PALU BESI	2 Buah	√	--
52	SEPATU BOT	13 Buah	√	--
53	VELTBED	13 Buah	6 Buah	7 Buah
54	TERPAL PLASTIK	36 Buah	32 Buah	4 Buah
55	LAMPU EMERGENCY	15 Buah	√	--
56	LAMPU CAS SOLAR	12 Buah	√	--
57	TABUNG GAS KECIL	1 Buah	√	--
58	TABUNG GAS BESAR	1 Buah	√	--
59	KOMPOR GAS	2 Buah	1 Buah	1 Buah
60	MOBIL RANGER	1 Unit	√	--
61	TRUK SERBAGUNA	1 Unit	√	--
62	MESIN SINSO BESAR	5 Buah	4 Buah	1 Buah
63	MESIN POTONG	1 Buah	√	--
64	KOMPRESOR	2 Buah	√	--
65	KOMPRESOR GAS	2 Buah	√	--
66	MATRAS BUSA	134 Lembar	√	--
67	KARPET	9 Buah	√	--
68	TOA	2 Buah	√	--
69	TANDU SCOOP	1 Buah	√	--
70	SENER BATERAI	2 Buah	√	--
71	SENER KEPALA	18 Buah	√	--
72	SENER CAS	21 Buah	√	--
73	MATRIL TRENDIA	4 Buah	√	--
74	TANGGA SLIDING	2 Buah	√	--
75	HELM PROYEK	10 Buah	√	--
76	HELM CLIMBING	10 Buah	√	--
77	WATER TREATMENT SYSTEM	1 Unit	--	√

78	MESIN LAS	1 Buah	√	--
79	BESI PENYANGGA	1 Buah	√	--
80	ROMPI PELAMPUNG	10 Buah	√	--
81	ROMPI RESCUE	1 Unit	√	--

**Tabel 2.6**  
**DATAR KEBENCANAAN/ KEJADIAN BULAN JANUARI S/D MARET 2019**

No	Waktu Kejadian		TKP Kejadian	Jenis Bencana	Waktu kejadian	Korban						Kronologis Kejadian	Perkiraan Kerugian	Tim Yang Terlibat	Jumlah Prosonil	Lamanya Evakuasi
	Hari	Tangga 1				Nama	Umur	Jenis kelamin	Kondisi Korban	Alamat Korban	Lokasi kejadian					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Sabtu	05-Jan-19	Ekor Lubuk	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa ruas jalan	18.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ekor Lubuk	Akibat angin badai pohon yang di pingir jalan tumbang menimpa bahu jalan.	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 orang	1 Jam
2	Sela sa	08-Jan-19	Silaing Bawah	Longsor	14.00 Wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Silaing Bawah (membersihkan material longsor)	Akibat hujan deras tebingdi Jalan padang Bukittinggi Longsor Menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	17 Orang	1 Jam
3	Min ggu	13-Jan-19	Koto Katik	Longsor	15.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Koto Katik (membersihkan material longsor)	Akibat hujan deras tebingdi Jalan Lingkar selatan Longsor Menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 jam
4	Rab u	16-Jan-19	Ekor Lubuk	Angin Badai (pohon tumbang menimpa kandang sapi)	18.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ekor Lubuk	Akibat angin badai pohon yang di pingir kandang sapi tumbang menimpa kandang sapi	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 jam



5	Minngu	20-Jan-19	Kampung Manggis	Angin Badai (pohon tumbang menimpa kandang sapi)	15.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Kampung Manggis	Akibat angin badai pohon yang di tumbang menimpa didin rumah warga kampung manggis. Akibat angin badai pohon yang di pingir jalan Padang Bukitinggi tumbang menimpa bahu jalan.	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 jam
6	Senin	21-Jan-19	Silaing Bawah	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	16.00 Wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Silaing Bawah	Akibat angin badai pohon yang di pingir jalan Padang Bukitinggi tumbang menimpa bahu jalan.	nihil	TRC Kota Padang Panjang	17 Orang	1 jam
7	Sabtu	02-Feb-19	Koto Panjang	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	17.10 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Koto Panjang ( mengenangi Mesjid Nurul Hidayah)	Akibat angin badai pohon yang di pingir jalan sigando tumbang menimpa bahu jalan.	nihil	TRC Kota Padang Panjang	17 Orang	1 jam
8	Senin	04-Feb-19	Sigando	Banjir	16.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Sigando	Akibat hujan deras beberapa jam jalan disimpang kacang kayu banjir, ketinggian air 1/2 m	nihil	TRC Kota Padang Panjang	17 Orang	1 jam
9	Rabu	06-Feb-19	Koto Panjang	Banjir	14.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Koto Panjang ( mengenangi Mesjid Nurul Hidayah)	Akibat hujan deras beberapa jam mesjid Nurul Hidayah tergenang air	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 jam

10	Sabtu	09-Feb-19	Balai-Balai	Banjir	19.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Balai-Balai banjiri menenangi jalan depan Bank Rayat Indonesia	Akibat hujan deras beberapa jam mengenai jalan di depan BRI, ketinggian air 1/2 m	nihil	TRC Kota Padang Panjang	18 Orang	1.5 Jam
11	Minggu	10-Feb-19	Sigando	Kebakaran Rumah warga	12.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Sigando	Menurut informasi dari pemilik rumah pada waktu itu kami sekeluarga keluar tak beberapa lama terima telpon bahwa rumah kami terbakar	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam
12	Rabu	13-Feb-19	Guguk Malintang	Angin Badai (batang bambu tumbang menimpa kandang sapi)	17:00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Guguk Malintang	Akibat angin badai pohon yang di tumbang menimpa bahu jalan guguk malintang.	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam
13	Jumat	15/02/2019	Ngalau	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	22.45 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ngalau	Akibat angin badai pohon yang di ngalau tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam
14	Minggu	17-Feb-00	Sigando	Angin Badai (batang bambu tumbang menimpa kandang sapi)	10.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Sigando	Akibat angin badai pohon yang di dekat kandang sapi tumbang menimpa kandang sapi sigando	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam

15	Rabui	20-Feb-19	Sigando	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	08.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Sigando	Akibat angin badai pohon yang di jalan sigando tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam
16	Kamis	21-Feb-19	Pasar Usang	Banjir	20.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Pasar Usang	Akibat hujan deras beberapa jam mengenai jalan dan rumah RT 12 ketinggian air 80 m	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam
17	Kamis	28-Feb-19	Silang Bawah	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	07.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Silaing Bawah	Akibat angin badai pohon yang di jalan silaing bawah tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 Jam
18	Jumat	01-Mar-19	Ganting	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	15:30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ganting	Akibat angin badai pohon yang di jalan gunung ganting tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	15 Orang	1 Jam
19	Rabu	06-Mar-19	Sigando	Angin Badai	14:30 WIB	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Sigando	Akibat angin bdbai menyebabkan bambu tumbang dan menimpa bahu jalani	nihil	TRC Kota Padang Panjang	17 Orang	1 Jam

20	Min ngu	10- Mar-19	Silaing Atas	Kebakaran	14:15 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Silaing Atas	Menurut informasi dari pemilik rumah pada waktu itu kami berada dilluar tahu- tahu ditingkat dua api udah membesar di perkiraan konsleting listrik	nihil	TRC Kota Padang Panjang	15 Orang	1 Jam
21	Sen in	11- Mar-19	Tanah Datar	Longsor	19.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kabupaten Tanah datar	Akibat hujan deras longsor di Singgalang Kariang Kabupaten Tanah Datar	nihil	TRC Kota Padang Panjang	15 Orang	1 jam
22	Rab u	13- Mar-19	Ngalau	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	07.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ngalau	Akibat angin badai pohon yang di jalanngalau tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	15 Orang	1 jam
23	Ju m'a t	15- Mar-19	Tanah Hitam	Banjir	14.00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Tanah Hitam	Akibat hujan deras beberapa jam mengenangi jalan, rumahtanah hitam ketinggian air 1/2 m	nihil	TRC Kota Padang Panjang	15 Orang	1. jam
24	Sen in	18- Mar-19	Tanah Hitam	Angin Puting beliung	14.50 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Tanah Hitam	Akibat angin puting beliung atas rumah kelurahan tanah hitam terbang	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1. jam

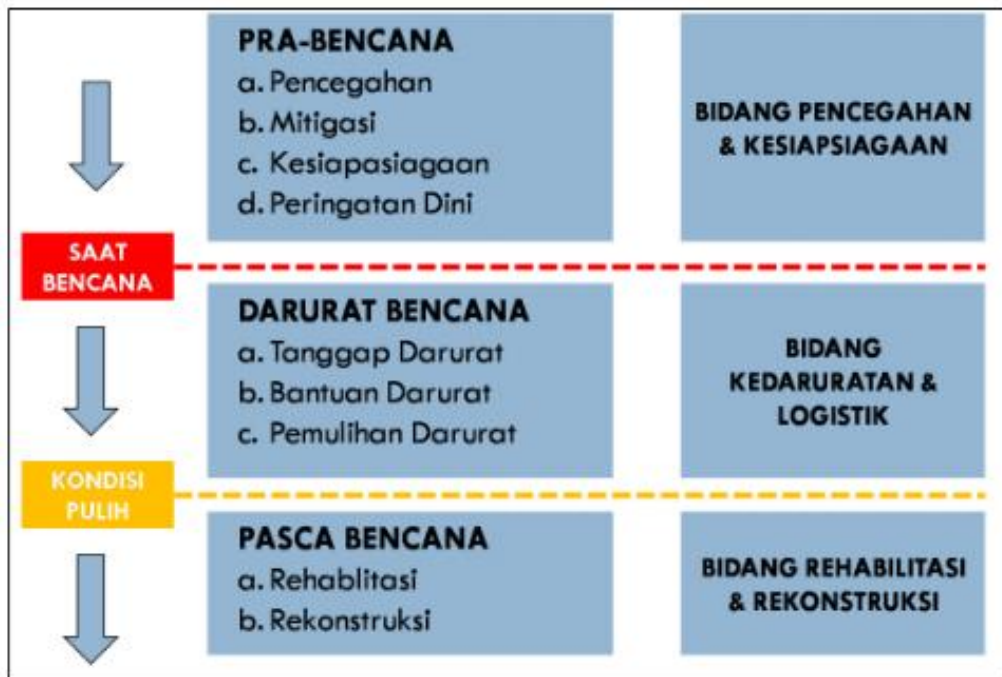
25	Rabu	20-Mar-19	Koto Katik	Longsor	16.30 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Koto Katik	Akibat hujan deras tebing gunung di Jalan padang Bukittinggi Longsor Menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	14 Orang	1. jam
26	Sabtu	23-Mar-19	Ekor Lubuk	Angin Badai	15:00 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ekor Lubuk	Akibat angin badai pohon yang di jalan ekor lubuk tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1. jam
27	Selasa	26-Mar-19	Tanah Datar	Orang Masuk Jurang	10.10 wib	Amir	32 Tahun	Laki-laki	Luka di bagian pinggang		Kabupaten Tanah datar	Menurut informasi dari saksi mata korban membuang sampah di jurang ikut terjatuh masuk jurang kedalam 7 m	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1. jam
28	Kamis	28-Mar-19	Balai-Balai	Banjir	16.45 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Balai-Balai	Akibat hujan deras beberapa jam menggenangi jalan, rumah di balai balai ketinggian air 80c m	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1. jam
29	Sabtu	31-Mar-19	Ganting	Angin Badai (pohon tumbang) menimpa bahu jalan	17.45 wib	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	Kelurahan Ganting	Akibat angin badai pohon yang di jalan Gunung ganting tumbang menimpa bahu jalan	nihil	TRC Kota Padang Panjang	16 Orang	1 jam

### 2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kesbangpol

Penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana, yang terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan yaitu pada saat pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Keterkaitan antara kegiatan penanggulangan bencana tersebut dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

**Gambar 2.1**

**Diagram Kegiatan Penanggulangan Bencana**



Secara garis besar penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pra Bencana
  - a. Tidak terjadi bencana
    - Perencanaan penanggulangan bencana
    - Pengurangan risiko bencana
    - Pencegahan
    - Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
    - Persyarakatn analisis risiko bencana
    - Penegakan rencana tata ruang

- Pendidikan dan pelatihan
  - Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana
- b. Terdapat potensi bencana
- 1) Mitigasi bencana
    - Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan
    - Pelaksanaan penataan ruang
    - Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan secara konvensional maupun modern
  - 2) Kesiapsiagaan
    - Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
    - Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini
    - Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
    - Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
    - Penyiapan lokasi evakuasi
    - Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
    - Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan sarana dan prasarana
  - 3) Peringatan Dini
    - Pengamatan gejala bencana atau deteksi dini
    - Analisis hasil pengamatan gejala bencana
    - Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang
    - Penyebarluasan informasi tentang peringatan dini bencana
    - Pengambilan tindakan oleh masyarakat

2. Tanggap darurat
  - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
    - Cakupan lokasi bencana
    - Jumlah korban
    - Kerusakan prasarana dan sarana
    - Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintah
    - Kemampuan sumber daya alam maupun buatan
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana, yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan :
    - Skala bencana nasional dilakukn oleh presiden
    - Skala provinsi dilakukan oleh gubernur
    - Skala kab/kota dilakukan oleh bupati/walikota
  - c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana
    - Pencarian dan penyelamatan korban
    - Pertolongan darurat
    - Evakuasi korban
  - d. Pemenuhan kebutuhan dasar
    - Kebutuhan air bersih dan sanitasi
    - Pangan
    - Sandang
    - Pelayanan kesehatan
    - Pelayanan psiko-sosial
    - Penampungan dan tempat hunian
  - e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
  - f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital, dengan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital serta melakukan perbaikan/penggantian akibat kerusakan bencana
3. Pasca Bencana
  - a. Rehabilitasi
    - Perbaikan lingkungan daerah bencana



- Perbaikan sarana dan sarana umum
  - Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
  - Pemulihan sosial psikologis
  - Pelayanan kesehatan
  - Rekonsiliasi dan resolusi konflik
  - Pemulihan sosial ekonomi budaya
  - Pemulihan keamanan dan ketertiban
  - Pemulihan fungsi pemerintahan
  - Pemulihan fungsi pelayanan publik
- b. Rekonstruksi
- Pembangunan kembali prasana dan sarana
  - Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat
  - Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat
  - Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan material yang lebih baik dan tahan bencana
  - Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat
  - Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya
  - Peningkatan fungsi pelayanan publik
  - Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat

Dalam rentang waktu sejak berdirinya lembaga BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang tahun 2010, belum terlalu banyak yang dapat diperbuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana. Kualitas sumber daya aparatur yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai serta alokasi anggaran yang sangat terbatas menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi walaupun demikian, BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang secara bertahap telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di bidang penanggulangan bencana maupun di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Di bidang penanggulangan bencana, telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan sesuai dengan tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mulai dari pra bencana, saat terjadinya bencana dan pasca bencana.

Pada tahap pra bencana telah dilaksanakan beberapa kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan. Penyiapan produk hukum daerah di bidang penanggulangan bencana, pembenahan kelembagaan BPBD dan pembentukan satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana merupakan prioritas yang sedang dilaksanakan dan terus di tingkatkan untuk masa yang akan datang. Sampai tahun 2018, telah dibentuk 160 satgas penanggulangan bencana pada seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Padang Panjang. 410 satgas penanggulangan bencana pada satuan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Bahkan di tingkat Kota Padang Panjang telah dibentuk Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops) penanggulangan bencana dan Tim Reaksi Cepat (TRC) penanggulangan bencana BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang. Satgas yang dibentuk tersebut, keberadaannya diharapkan dapat memperlancar penanggulangan bencana secara terpadu dan terkoordinir.

Kegiatan sosialisasi, penyuluhan, simulasi penanggulangan bencana secara bertahap telah dilaksanakan, dengan sasaran seluruh stakeholder dan masyarakat Kota Padang Panjang, dengan harapan masyarakat Kota Padang Panjang memiliki kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Di samping itu, juga telah disusun beberapa dokumen penanggulangan bencana, diantaranya dokumen analisis potensi resiko bencana sebagai acuan untuk menentukan tingkat resiko bencana dan skala prioritas dalam pengurangan resiko bencana, dokumen prosedur tetap (protap) penanggulangan bencana, sebagai acuan dalam penanganan saat terjadinya bencana.

Pada tahap tanggap darurat, mengacu pada bencana yang pernah terjadi di Kota Padang Panjang, seperti kebakaran pasar Kota Padang

Panjang dan angin ribut yang menyebabkan robohnya beberapa rumah, telah dilaksanakan kegiatan penanganan terhadap bencana tersebut, mulai dari melakukan pengkajian cepat terhadap dampak dari bencana yang terjadi, penetapan status tanggap darurat untuk memudahkan dalam penyelamatan dan evakuasi dari korban bencana sampai kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan menyediakan tempat penampungan sementara bagi korban bencana tersebut. Pada tahap pasca bencana, dilaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana, namun saat ini BPBD Kesbangpol baru sebatas pemberi rekomendasi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang sebagian besar dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Panjang.

Di bidang kesatuan bangsa dan politik, telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan wawasan kebangsaan dan bela negara, menciptakan stabilitas politik yang kondusif dengan pembinaan politik dalam negeri serta mewujudkan kondisi yang damai, aman, nyaman dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Pembinaan terhadap partai politik dan organisasi kemasyarakatan telah dilaksanakan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan serta penyampaian informasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan partai politik dan organisasi kemasyarakatan tersebut.

**Tabel T-C.23**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(8)	(19)	(20)
1	Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial				-	-	1 th	1 th	1 th	-	-	1 th	1 th	1 th	0%	0%	97,64%	95,75%	79,44%
2	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi				-	-	1 th	1 th	1 th	-	-	1 th	1 th	1 th	0%	0%	64,43%	27,93%	42,35 %
3	Pelatihan Manajemen Pengurus FKPM Kota Padang Panjang.				-	-	-	-	1 th	-	-	-	-	1 th	0%	0,00%	0%	0%	100%
4	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanggulangan bencana				1 th	1 pkt	-	-	-	1 th	1 pkt	-	-	-	86,09%	74,35%	0%	0%	0%
5	Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Alam				1 pkt	200 org	-	-	-	1 pkt	200 org	-	-	-	91,26%	0%	0%	0%	0%
6	Peningkatan Pelayanan Penanganan Penanggulangan Bencana				1 th	100%	-	100 %	100%	1 th	100%	-	100%	100 %	100,00 %	54,42%	0%	97,10%	81,11 %
7	Revitalisasi Kelembagaan dan Penanggulangan Bencana				25 lembaga	1 th	1 pkt	-	-	25 lembaga	1 th	1 pkt	-	-	89,56%	84,84%	100%	0%	0%

8	Pelatihan Kantor Sendiri				26 org	-	-	-	-	26 org	-	-	-	-	82,02%	0%	0%	0%	0%
9	Pendidikan dan Latihan Dasar Rescuer Kota Padang panjang				25 org	-	-	-	-	25 org	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
10	Diklat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.				120 org	120 org	-	-	-	120 org	120 org	-	-	-	58,67%	54,92%	0%	0%	0%
11	Pendidikan wawasan Kebangsaan				100 org	1 th	-	-	45 org	100 org	1 th	-	-	45 org	61,64%	26,34%	0%	0%	0%
12	Forum Kerukunan Antar Etnis				-	1 pkt				-	1 pkt				0,00%	0,00%	0%	0%	0%
13	Pengawasan Tim Orang Asing NGO dan lembaga Asing				1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	97%	86,67%	71,63%	78,77%	52,67 %
14	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama				1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	91%	90,49%	0%	83,58%	86,63 %
15	Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)				1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	99,59%	33,39%	77,74%	94,83%	68,60 %
16	Fasilitas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( Pakem )				-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	0,00%	0,00%	0,00%	83%	0%
17	Bintek Penguatan Kelembagaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.				80 org	80 org	-	-	-	80 org	80 org	-	-	-	71%	93,56%	0%	0%	0%
18	Pengawasan Gangguan Keamanan				1 pkt	1 pkt	-	-	-	1 pkt	1 pkt	-	-	-	5,96%	0%	0%	0%	0%
19	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				1 pkt	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
20	Penelitian Administrasi Bantuan Partai				1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	9 parpol	1 pkt	1 pkt	1 pkt	1 pkt	9 parpol	43,90%	55,91%	93,46%	82,57%	75,59 %

21	Sosialisai UU Parpol dan Bantuan Keuangan Parpol.				40 org	50 org	-	-	-	40 org	50 org	-	-	-	46,64%	72,61%	0%	0%	0%
22	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kada				1 pkt	1 pkt	-	100 %	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	100%	1 pkt	80,92%	98,67%	0%	0%	0%
23	Bintek/Sosialisasi peran Ormas dan LSM serta Penelitian Bantuan Hibah				-	80 org	-	-	-	-	80 org	-	-	-	0,00%	66,77%	0%	0%	0%
24	Penumbuhan Kelurahan Tangguh Bancana						-	-	1 pkt			0	-	1 pkt	0%	0%	0%	0%	0%
25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Anacamam/korban Bancana Alam				100%	1 th	1 th	100 %	-	100%	1 th	1 th	100%	-	100%	73,65%	88,36%	94,80%	-
26	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Jambore )				-	-	1 kali	1 kali	1 kali	-	-	1 kali	1 kali	1 kali	0%	0%	94,08%	93,22%	73,29%
27	Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi				1 pkt	1 pkt	-	-	100 org	1 pkt	1 pkt	-	-	100 org	92%	90,11%	0%	0%	79,56 %
28	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang 2018				-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	0%	0%	0%	59,93%	0%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang 2019				-	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0%	0%	0%	0%	100%

29	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam				-	-	-	-	240 org	-	-	-	-	240 org	0%	0%	0%	0%	72,64%
30	Pengadaan Rambu-Rambu Bencana				1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	71,45%	96,22%	99,14%	0%	0%
31	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana				1 th	1 th	1 th	1 pkt	1 pkt	1 th	1 th	1 th	1 pkt	1 pkt	8,77%	12,32%	38,38%	90,53%	76,57%
32	Pusdalops Penanggulangan Bencana				1 th	1 th	20 org	20 org	20 org	1 th	1 th	20 org	20 org	20 org	0%	0%	60,21%	94,43%	96,93 %
33	Sosialisasi Kedaruratan Bencana	-	-	-	-	-	-	-	100 org	-	-	-	-	100 org	0%	0%	0%	0%	0%
34	Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana				1 th	-	-	-	-	1 th	-	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%
36	Sosialisasi Perda Penanggulangan Bencana Kota Padang Panjang				-	1 bh	-	-	200 org	-	1 bh	-	-	200 org	0%	96,72%	0%	0%	100%
37	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Peneggulangan Bencana Alam				-	-	-	6 doku men	-	-	-	-	6 doku men	-	0%	0%	0%	100%	0%
39	Sosialisasi Persyaratan Standar Kontruksi Bangunan Gedung				-	80 org	-	-	-	-	80 org	-	-	-	0%	86,66%	0%	0%	0%
41	Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bancana				-	1 th	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	1 th	1 pkt	1 pkt	1 pkt	0%	0%	76,61%	96,73%	92,76%
42	Simulasi Tanggap Darurat dalam Penanggulangan Bencana				-	1 th	-	-	-	-	1 th	-	-	-	0%	61,56%	0%	0%	0%
43	Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana.				-	1 th	56 org	-	75 org	-	1 th	56 org	-	75 org	0%	94,03%	100%	0%	96,14%

44	Pemeliharaan Rambu-Rambu				-	1 th	-	-	-		1 th	-	-	0%	0%	99,98%	0%	0%	
45	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Muniman keras dan Narkoba				-	-	90 Org	90 org	-	-	-	90 Org	90 org	0%	0%	0%	95,18	74,38%	
46	Kegiatan Pendididkan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.				1 pkt	-	-	-	1 pkt	20 org	-	-	-	94,77%	0%	0%	0%	0%	
47	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.				1 pkt	50 org	1 pkt	-	-	1 pkt	50 org	1 pkt	-	-	91,31%	97,27%	72,02%	0%	0%
48	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.				1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	0%	92,50%	99,53%	0%	0%
49	Kegiatan Pencagahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran				1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	100%	98,84%	70,29%	0%	0%
50	Penigkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.				1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	72,93%	100%	99,99%	0%	0%
51	Penyediaan Jasa Tenaga Balakar Penaggulangan Kebakaran.				1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	1 pkt	1 pkt	1 pkt	-	-	98,41%	97,55%	97,03%	0%	0%
52	Inspeksi jalan				-	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	-	1 pkt	1 pkt	-	1 pkt	0%	57,08%	79,71%	0%	0%
53	Inspeksi Jembatan				-	1 pkt	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-		61.93%	0%	0%	0%
54	Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Femanfaatan Tanah.				-	1 pkt	-	-	-	-	1 pkt	-	-	-	0%	0%	0%	0%	0%



**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD, Kesbangpol**  
**Kota Padang Panjang**

NO	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
( 1 )	( 2 )	( 3 )	( 4 )	( 5 )	( 6 )	( 7 )	( 8 )	( 9 )	( 10 )	( 11 )	( 12 )	( 13 )	( 14 )	( 15 )	( 16 )	( 17 )	( 18 )	( 19 )
	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6.131.917.500</b>	<b>11.574.596.800</b>	<b>4.605.802.158</b>	<b>5.097.971.880</b>	<b>5.295.736.117</b>	<b>4.624.160.666</b>	<b>3.436.674.660</b>	<b>3.582.372.742</b>									
<b>I</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>1.430.359.000</b>	<b>1.547.197.500</b>	<b>1.279.965.200</b>	<b>1.258.196.300</b>	<b>1.082.912.770</b>	<b>2.099.538.191</b>	<b>1.065.061.150</b>	<b>936.782.499</b>	<b>835.924.614</b>	<b>1.030.348.433</b>						<b>1.462.020.054</b>	<b>1.406.307.880</b>
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	5.172.000	3.975.000	3.225.000	2.175.000	2.500.000	3.927.000	3.678.000	3.000.000	2.175.000	2.490.000	76%	93%	93%	100%	99,60 %	3.409.400	3.535.000
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71.268.000	79.200.000	82.200.000	67.450.000	32.400.000	41.152.337	37.437.560	44.183.745	33.868.084	20.069.053	58%	47%	54%	50%	61,94 %	66.503.600	40.924.547
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	494.114.000	483.184.000	447.412.500	478.409.700	325.574.300	318.029.164	308.408.122	341.058.446	238.747.967	307.996.046	64%	64%	76%	50%	94,60 %	445.738.900	322.498.577
4	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	130.540.000	105.900.000	66.000.000	72.800.000	0	103.780.000	105.775.000	63.975.000	59.950.000	-	80%	100%	97%	82%	0,00 %	75.048.000	91.176.667
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8.591.000	9.241.400	69.545.000	71.741.600	68.241.600	7.917.800	7.988.280	48.773.998	53.122.376	63.018.632	92%	86%	70%	74%	92,35 %	45.472.120	21.560.026
6	Penyediaan alat tulis kantor	36.532.000	20.000.000	30.000.000	35.000.000	23.000.000	29.988.750	19.926.690	25.555.415	22.800.775	22.708.400	82%	100%	85%	65%	98,73 %	28.906.400	25.156.952
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.726.000	20.185.000	23.445.000	40.620.000	23.001.870	22.145.000	12.365.210	16.058.735	11.912.150	16.398.450	83%	61%	68%	29%	71,29 %	26.795.574	16.856.315
8	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	9.846.000	10.519.100	10.937.700	10.000.000	6.000.000	6.585.800	5.439.280	5.757.450	8.635.500	5.189.000	67%	52%	53%	86%	86,48 %	9.460.560	5.927.510
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.750.000	3.000.000	0	0	0	2.735.600	2.438.000	0	0	-	99%	81%	0%	0%	0,00 %	2.875.000	2.586.800
10	Penyediaan makanan dan minuman	196.320.000	252.610.000	249.600.000	60.000.000	36.995.000	1.258.196.300	111.770.360	108.702.000	49.718.900	31.934.500	641%	44%	44%	83%	86,32 %	159.105.000	492.889.553
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	351.000.000	295.000.000	297.600.000	420.000.000	565.200.000	230.170.440	294.834.648	279.717.710	354.993.862	560.544.352	66%	100%	94%	85%	99,18 %	385.760.000	268.240.933
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran	97.500.000	200.375.000	0	0	0	74.910.000	155.000.000	0	0	-	77%	77%	0%	0%	0,00 %	148.937.500	114.955.000
13	Premi tenaga kerja dan kesehatan masyarakat	0	64.008.000	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0%	0%	0,00 %	64.008.000	0

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>256.045.000</b>	<b>272.336.300</b>	<b>323.905.000</b>	<b>338.287.500</b>	<b>285.500.000</b>	<b>228.626.700</b>	<b>244.847.460</b>	<b>240.494.300</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>295.214.760</b>	<b>237.989.487</b>
14	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0	0	0	0	473.650.000	0	0	0		453.851.500	0%	0%	0%	0%	95,82 %	473.650.000	0
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	115.410.000	189.596.300	0	233.250.000	36.600.000	101.861.800	174.454.000	0		31.600.000	88%	92%	0%	0%	86,34 %	41.061.164	138.157.900
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	159.200.000	0	0	0	-	134.533.500					84,51 %		
17	Pengadaan Meubelier	25.985.000	28.885.000	0	0	27.100.000	21.590.000	26.000.000	0	0	24.128.000				0%	89,03 %	40.985.000	23.795.000
18	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung kantor	97.500.000	38.000.000	125.000.000	40.000.000	35.000.000	95.318.500	36.275.660	66.942.300	42.627.020	23.782.649	98%	95%	54%	107%	67,95 %	67.100.000	66.178.820
19	Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat kantor	17.150.000	15.855.000	33.225.000	65.037.500	27.600.000	9.856.400	8.117.800	13.692.000	17.423.135	9.208.440	57%	51%	41%	27%	33,36 %	31.773.500	10.555.400
20	Rehabilitas Sedang/berat Gedung Kantor	0	0	165.680.000	0	0	0	0	159.860.000		-				0%	0,00 %	82.840.000	159.860.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>89.250.000</b>	<b>67.550.000</b>	<b>0</b>	<b>36.700.000</b>	<b>0</b>	<b>86.942.500</b>	<b>65.150.000</b>	<b>0</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>64.500.000</b>	<b>76.046.250</b>
21	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	89.250.000	67.550.000	0	36.700.000	0	86.942.500	65.150.000	0		-	97%	96%	0%	0%	0,00 %	48.375.000	76.046.250
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>80.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>65.000.000</b>	<b>33.675.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>19.500.000</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>65.000.000</b>	<b>20.725.000</b>
22	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	80.000.000	60.000.000	45.000.000	75.000.000	65.000.000	33.675.000	9.000.000	19.500.000	28.600.000	64.500.000	42%	15%	43%	38%	99,23 %	65.000.000	20.725.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>1.616.000</b>	<b>429.000</b>	<b>608.158</b>	<b>775.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.613.675</b>	<b>429.000</b>	<b>606.315</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>865.632</b>	<b>882.997</b>
23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi keinerja SKPD	58.000	64.000	64.000	75.000	200.000	57.925	64.000	63.875	74.900	200.000	100%	100%	0%	100%	100,00 %	92.200	61.933
24	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	88.000	165.000	165.000	200.000	200.000	85.750	165.000	164.500	195.125	200.000	97%	100%	0%	98%	100,00 %	163.600	138.417
25	Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaran	35.000	165.000	163.908	200.000	200.000	35.000	165.000	162.690	195.125	200.000	100%	100%	0%	98%	100,00 %	152.782	120.897
26	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.435.000	35.000	215.250	300.000	300.000	1.435.000	35.000	215.250	299.950	300.000	100%	100%	0%	100%	100,00 %	457.050	561.750
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>			<b>110.612.500</b>	<b>928.430.000</b>	<b>573.886.600</b>	<b>0</b>		<b>83.280.500</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>806.464.550</b>	<b>83.280.500</b>

27	Pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik Sosial	0	0	36.175.000	529.655.000	280.820.000	0	0	33.450.000	446.614.269	223.077.083	0%	0%		84%	79,44 %	282.216.667	33.450.000
28	Pelaksanaan Forum Koordinasi dan Diskusi	0	0	74.437.500	398.775.000	281.275.000	0	0	47.958.000	111.396.000	119.122.263	0%	0%		28%	42,35 %	377.243.750	47.958.000
29	Pelatihan Manajemen Pengurus FKPM Kota Padang Panjang.	0	0	0	0	11.791.600	0	0	0		11.791.600	0%	0%		0%	100,00 %	11.791.600	0
30	Tim terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	0	0	0	0	25.400.000	0	0	0		12.885.750	0%	0%	0%	0%	50,73 %		
31	Sosialisasi Undang-Undang No, 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	0	0	0	0	27.730.000	0	0	0		21.891.600	0%	0%	0%	0%	78,95 %		
32	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan politik bagi Pemilih Pemula	0	0	0	0	29.250.000	0	0	0		22.329.300	0%	0%	0%	0%	76,34 %		
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>556.353.500</b>	<b>312.056.500</b>	<b>29.640.000</b>	<b>359.276.250</b>	<b>136.605.000</b>	<b>374.015.800</b>	<b>225.283.425</b>	<b>29.640.000</b>		-				<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>278.786.250</b>	<b>209.646.408</b>
33	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Penanggulangan bencana	37.323.000	20.214.000	0	0	0	32.131.800	15.030.000	0		-	86%	74%	0%	0%	0,00 %	19.179.000	23.580.900
34	Pelatihan Manajemen Penanggulangan Bencana Alam	88.360.000	81.617.500	0	301.986.250	0	80.640.200	80.970.200	0		-	91%	0%	0%	0%	0,00 %	117.990.938	80.805.200
35	Peningkatan Pelayanan Penanganan Penanggulangan Bencana	80.378.000	75.777.500	0	57.290.000	136.605.000	74.975.400	41.241.000	0	71.652.000	110.801.144	93%	54%	0%	125%	81,11 %	87.512.625	58.108.200
36	Revitalisasi Kelembagaan dan Penanggulangan Bencana	116.700.000	47.482.500	29.640.000	0	0	104.515.900	40.285.000	29.640.000		-	90%	85%	0%	0%	0,00 %	64.607.500	58.146.967
37	Pelatihan Kantor Sendiri	30.402.000	0	0	0	0	24.936.500	0	0		-	82%	0%	0%	0%	0,00 %	30.402.000	24.936.500
38	Pendidikan dan Latihan Dasar Rescuer Kota Padang Panjang	106.350.500	0	0	0	0	0	0	0		-	0%	0%	0%	0%	0,00 %	106.350.500	0
38	Diklat Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana.	96.840.000	86.965.000	0	0	0	56.816.000	47.757.225	0		-	59%	55%	0%	0%	0,00 %	91.902.500	52.286.613
VIII	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN.	68.450.000	61.610.000			19.420.000	0	16.227.300	0						0%	0%	49.826.667	8.113.650
39	Pendidikan wawasan Kebangsaan	68.450.000	61.610.000	0	0	19.420.000	16.507.100	16.227.300	0		16.479.500	24%	26%	0%	0%	84,86 %	49.826.667	16.367.200
<b>IX</b>	<b>PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN.</b>	<b>32.000.000</b>	<b>33.175.000</b>	<b>45.750.000</b>	<b>112.070.000</b>	<b>364.475.000</b>	<b>29.816.200</b>	<b>29.456.000</b>	<b>32.769.100</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>117.494.000</b>	<b>30.680.433</b>
40	Pengawasan Tim Orang Asing dan LSM/ Organisasi	11.725.000	14.750.000	45.750.000	83.575.000	158.325.000	11.350.000	12.783.600	32.769.100	65.829.000	83.391.577	97%	87%	72%	79%	52,67 %	62.825.000	18.967.567
41	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	20.275.000	18.425.000	0	28.495.000	206.150.000	18.466.200	16.672.400	0	23.816.000	178.644.452	91%	0%	0%	84%	86,66 %	68.336.250	17.569.300

<b>X</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAAN</b>	<b>202.160.000</b>	<b>417.972.500</b>	<b>343.500.000</b>	<b>344.700.000</b>	<b>601.710.000</b>	<b>163.652.700</b>	<b>139.566.175</b>	<b>267.048.090</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>382.008.500</b>	<b>190.088.988</b>
42	Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda)	147.850.000	380.050.000	343.500.000	344.700.000	601.710.000	147.242.500	123.850.000	267.048.090	446.376.354	412.798.091	100%	33%	78%	129%	68,60%	363.562.000	179.380.197
43	Bintek Penguatan Kelembagaan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat.	21.560.000	16.797.500	0	0	0	15.225.400	15.716.175	0		-	71%	0%	0%	0%	0,00%	19.178.750	15.470.788
44	Pengawasan Gangguan Keamanan	19.875.000	21.125.000	0	0	0	1.184.800	0	0		-	6%	0%	0%	0%	0,00%	20.500.000	1.184.800
45	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	12.875.000	0	0	0	0	0	0	0		-	0%	0%	0%	0%	0,00%	12.875.000	0
<b>XI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>				<b>108.750.000</b>		<b>0</b>			<b>36.279.900</b>					<b>33%</b>	<b>0%</b>	<b>108.750.000</b>	<b>0</b>
46	Fasilitas Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat ( PAKEM )	0	0	0	108.750.000	0	0	0	0	36.279.900	-	0%	0%	0%	33%	0,00%	108.750.000	0
<b>XII</b>	<b>PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT.</b>	<b>249.305.000</b>	<b>157.101.000</b>	<b>6.687.500</b>	<b>141.410.500</b>	<b>182.325.300</b>	<b>188.394.800</b>	<b>140.153.100</b>	<b>6.250.000</b>			<b>76%</b>	<b>89%</b>	<b>93%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>147.365.860</b>	<b>111.599.300</b>
47	Penelitian Administrasi Bantuan Partai	17.475.000	11.625.000	6.687.500	8.912.500	23.072.500	7.671.600	6.500.000	6.250.000	7.359.450	17.440.400	44%	0%	0%	83%	75,59%	13.554.500	6.807.200
48	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 kota Padang Panjang	0	0	0	0	159.252.800	0	0	0	67.073.434	158.807.646	0%	0%	0%	0%	99,72%		
49	Sosialisasi UU Parpol dan Bantuan Keuangan Parpol.	20.025.000	15.661.500	0	0	0	9.339.400	11.371.800	0		-	47%	73%	0%	0%	0,00%	17.843.250	10.355.600
50	Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pemilu Kada	211.805.000	111.620.000	0	132.498.000	0	171.383.800	110.133.200	0		-	81%	99%	0%	0%	0,00%	151.974.333	140.758.500
51	Bintek/Sosialisasi peran Ormas dan LSM erta Penelitian Bantuan Hibah	0	18.194.500	0	0	0	12.148.100	0	0		-	0%	67%		0%	0,00%	18.194.500	12.148.100
<b>XIII</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM</b>	<b>1.239.345.000</b>	<b>1.005.256.500</b>	<b>1.075.153.400</b>	<b>1.286.906.330</b>	<b>1.833.856.447</b>	<b>120.175.900</b>	<b>417.630.900</b>	<b>667.540.038</b>						<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1.288.103.535</b>	<b>401.782.279</b>
52	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Anacam/korban Bancana Alam.	199.206.000	126.783.000	96.050.000	106.215.000	0	0	93.374.000	84.866.000	0	-	0%	74%	88%	0%	0,00%	132.063.500	89.120.000
53	Sosialisasi Kedaruratan Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	0,00%	0	0
54	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Jambore )	0	0	37.187.500	39.500.000	297.254.000			34.985.500		217.868.309	0%	0%	94%	0%	73,29%	124.647.167	34.985.500

55	Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Pengungsi.	49.905.000	62.611.000	0	0	47.895.000	45.860.900	56.420.500	0		38.107.300	92%	90%	0%	0%	79,56 %	53.470.333	51.140.700
56	Penumbuhan Kelurahan Tangguh Bencana	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0%	0%	0%	0%	0,00 %	0	0
57	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alm	0	0	0	0	185.301.000	-	0	0		134.595.944	0%	0%	0%	0%	72,64 %	185.301.000	0
58	Pengadaan Rambu-Rambu Bencana	36.775.000	26.475.000	50.400.000	0	0	26.275.000	25.475.000	49.965.000	0	-	71%	96%	99%	0%	0,00 %	37.883.333	33.905.000
59	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	548.025.000	490.225.000	266.400.000	273.780.000	322.650.000	48.040.000	60.391.200	102.080.100		247.037.156	9%	12%	38%	0%	76,57 %	380.216.000	70.170.433
60	Pusdalops Penanggulangan Bencana	177.575.000	0	564.799.050	685.158.000	882.316.000	0	0	340.074.288		811.115.960	0%	0%	60%	0%	91,93 %	577.462.013	340.074.288
61	Pembuatan Rencana Penanggulangan Bencana.	227.859.000		0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	0,00 %	227.859.000	0
62	Sosialisasi Perda dan Perwako Penanggulangan Bencana Kota Padang Panjang	-	54.610.000		0	25.197.947	0	52.818.500	0		25.197.947	0%	97%	0%	0%	100,00 %	39.903.974	52.818.500
63	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penanggulangan Bencana Alam	-	-	0	133.703.330	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	0,00 %	133.703.330	0
64	Sosialisasi Persyaratan Standar Kontruksi Banguanan Gedung	-	43.397.500	0	0		0	37.606.300	0	0	-	0%	87%	0%	0%	0,00 %	43.397.500	37.606.300
65	Verifikasi dan Validasi Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana.	-	64.915.000	20.287.500	48.550.000	11.800.000	0	0	15.541.300	0	10.946.050	0%	0%	77%	0%	92,76 %	36.388.125	15.541.300
66	Simulasi Tanggap Darurat dalam Penanggulangan Bencana	-	112.605.000	0	0		0	69.322.000			-	0%	62%	0%	0%	0,00 %	112.605.000	69.322.000
67	Sosialisasi Manajemen Logistik dan Peralatan Bencana.	-	23.635.000	30.629.350	0	61.442.500	0	22.223.400	30.629.350	0	59.069.600	0%	94%	100%	0%	96,14 %	38.568.950	26.426.375
68	Pemeliharaan Rambu-Rambu	-		9.400.000	0		0	0	9.398.500	0	-	0%	0%	100%	0%	0,00 %	9.400.000	9.398.500
XI V	<b>PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT).</b>				<b>107.470.000</b>	<b>149.145.000</b>	<b>0</b>								0%	0%	<b>256.615.000</b>	<b>0</b>
69	Penyuluhan Pencegahan Peredaran Muniman keras dan Narkoba	0	0	0	107.470.000	149.145.000	0	0	0	102.291.900	110.936.425				95%	74,38 %	128.307.500	0
XV	<b>PROGRAM PENANGANAN DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA ALAM</b>	0	0	0	0	0	0	0	0						0%	0%	0	0
70	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	0,00 %	0	0

71	Penyusunan JITU PASNA (DaLA, dan PDNA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	0%	0%	0%	0,00%	0	0
XV I	<b>PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN.</b>	<b>1.927.034.000</b>	<b>1.078.380.000</b>	<b>1.330.810.400</b>		<b>0</b>	<b>776.963.800</b>	<b>1.048.744.700</b>	<b>1.287.166.900</b>						0%	0%	<b>1.445.408.133</b>	<b>1.037.625.133</b>
72	Kegiatan Pendididkan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.	100.734.000	0	0	0	0	95.470.400	0	0	0	-	95%	0%	0%	0%	0,00%	100.734.000	95.470.400
72	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran.	64.806.000	34.510.000	36.804.000	0	0	59.173.000	33.568.000	26.505.200	0	-	91%	97%	72%	0%	0,00%	45.373.333	39.748.733
74	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran.	1.099.029.000	113.210.000	190.450.000	0	0	0	104.718.000	189.560.000	0	-	0%	92%	100%	0%	0,00%	467.563.000	147.139.000
75	Kegiatan Pencagahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran.	16.025.000	17.915.000	18.850.000	0	0	16.025.000	17.706.300	13.250.000	0	-	100%	99%	70%	0%	0,00%	17.596.667	15.660.433
75	Penigkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.	117.300.000	98.350.000	181.500.000	0	0	85.550.000	98.350.000	181.485.000	0	-	73%	100%	100%	0%	0,00%	132.383.333	121.795.000
77	Penyediaan Jasa Tenaga Balakar Penaggulangan Kebakaran.	529.140.000	814.395.000	903.206.400	0	0	520.745.400	794.402.400	876.366.700	0	-	98%	98%	97%	0%	0,00%	748.913.800	730.504.833
XV II	<b>PROGRAM INSPEKSI JALAN DAN JEMBATAN.</b>		<b>61.532.500</b>	<b>14.170.000</b>		<b>0</b>	<b>520.745.400</b>	<b>35.125.450</b>	<b>11.295.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>				0%	0%	25.234.167	283.582.925
78	Inspeksi jalan	0	42.920.000	14.170.000	0	0	520.745.400	23.597.825	11.295.000	0	-	0%	0%	0%	0%	0,00%	19.030.000	185.212.742
79	Inspeksi Jembatan	0	18.612.500	0	0	0	-	11.527.625		0	-				0%	0,00%	18.612.500	11.527.625
XV III	<b>PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN FEMANFAATAN TANAH</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>				<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>0</b>
80	Penataan Penguasaan Pemilikan Penggunaan dan Femanfaatan Tanah.	0	6.500.000.000	0	0	0		-	0	0	-	0%	0%	0%	0	0,00%	3.250.000.000	0

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kesbangpol**

Seperti halnya pembangunan tantangan permasalahan utama dalam penanggulangan bencana dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi dan paradigma baru agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur tetap (protap) kebencanaan sampai ke tingkat paling bawah dalam hal ini adalah pemerintah kelurahan.
2. Besarnya kapasitas dalam penanggulangan bencana sehubungan dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana.
3. Secara umum penanggulangan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaan masih banyak ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait.
4. Perlunya alokasi anggaran yang ideal dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan pengembangan OPD adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan terbitnya Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan aturan-aturan turunnya yang terdiri dari peraturan pemerintah, perpres, peraturan menteri dan peraturan kepala BNPB serta Peraturan Kepala Daerah sampai saat ini regulasi untuk penanggulanagn bencana terus menerus diperbaharui dan diesmpurnakan.
2. Sudah terbentuknya BPBD Kota Padang Panjang Tahun 2010 sebagai salah satu lembaga yang menangani secara khusus penanggulangan bencana daerah.

3. Selanjutnya semakin bertambahnya perhatian pemerintah dan lembaga-lembaga usaha, pendidikan pada isu pengurangan resiko bencana, terutama terkait dengan kecenderungan perubahan iklim global yang dampaknya kian memburuk dimana penanggulangan bencana dan pengurangan resiko bencana sudah menjadi tanggung jawab bersama.

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar maka Renstra BPBD, Kesbangpol telah mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum. Hal ini tergambar dari paparan program kerja khususnya yang terkait dengan peningkatan kewaspadaan dini serta penanganan konflik sosial serta pengembangan wawasan dan ketahanan bangsa.

Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dalam hal ini juga lebih banyak berfokus pada penanganan dan pembinaan partai politik, seperti klinik administrasi bantuan parpol yang membantu parpol politik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan administrasi lainnya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memperoleh rekomendasi BPK RI untuk mendapat bantuan parpol tahun berikutnya.

Mengacu pada hasil analisis Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas-tugas pokok dan fungsinya adalah :

**(a) Kondisi politik :**

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.



3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

**(b) Kondisi Sosial:**

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

**(c) Kondisi Ekonomi :**

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

**(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :**

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

**(a) Kondisi Politik :**

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

**(b) Kondisi Sosial Budaya :**

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"

4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

**(c) Kondisi Ekonomi :**

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.
5. Penduduk Sumatera Barat yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

**(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :**

1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan pembangunan nasional dan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui pembangunan pada seluruh sektor dan bidang pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan ini, Kota Padang Panjang juga dihadapkan kepada berbagai permasalahan utama dalam pembangunan yang harus diselesaikan baik secara bertahap maupun secara keseluruhan dan berkesinambungan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki.

Dalam rentang waktu sejak berdirinya BPBD Kesbangpol tahun 2010, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dan kesatuan bangsa dan politik, masih banyak permasalahan yang perlu untuk dibenahi. Dalam melaksanakan tugas BPBD, Kesbangpol menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Belum terciptanya keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana.
2. Masih rendahnya kualitas aparatur BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana.
3. Belum maksimalnya ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan
4. Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana.
5. Belum tersedianya dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana

6. Belum optimalnya pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan
7. Masih lemahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang.
8. Belum optimalnya penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang.
9. Menurunnya rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara

Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa permasalahan-permasalahan pelayanan penanggulangan bencana Kota Padang Panjang sehubungan dengan Indeks Resiko Bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan Kerangka Hukum Penanggulangan Bencana.
  - a. Mengintegrasikan secara menyeluruh regulasi yang ada atau yang akan dirumuskan kemudian hari dengan kebijakan penanggulangan bencana utamanya adalah kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB).
  - b. Memperkuat jaminan ketersediaan cadangan anggaran untuk pelaksanaan penanganan darurat bencana daerah sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi kelompok-kelompok rentan terhadap dampak bencana.
2. Pengarusutamaan Penanggulangan bencana dalam Pembangunan.  
 Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang responsif *gender* dalam pembangunan Kota Padang Panjang periode 2018–2023 melalui penerapan kajian risiko bencana sebagai dasar pertimbangan pelaksanaan pembangunan dan penanaman modal.
3. Peningkatan Kemitraan Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana.
  - a. Terselenggaranya publikasi aktivitas-aktivitas PRB dilakukan secara transparan melalui media-media lokal secara menyeluruh kepada masyarakat.

- b. Adanya aktivitas pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan di setiap tingkatan sekolah secara mandiri dan responsif *gender*.
  - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap rencana publikasi yang diterapkan pada suatu daerah dalam meningkatkan praktik budaya pengurangan risiko bencana.
  - d. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana. Arah atau sasaran pada strategi efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana adalah mendayagunakan hasil riset kebencanaan daerah untuk menurunkan rasio pemakaian anggaran untuk pemulihan pasca bencana.
4. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana.
- a. Memperkuat sistem peringatan dini bencana untuk menyebarluaskan informasi peringatan secara menyeluruh di setiap wilayah yang berisiko.
  - b. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan upaya penanganan darurat bencana untuk menekan jumlah korban yang timbul.
  - c. Penguatan peran dan fungsi PUSDALOPS maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat di dalamnya.
5. Peningkatan Kapasitas Pemulihan Bencana
- a. Sinkronisasi program-program dunia usaha dan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian dan sektor produksi masyarakat secara terencana, terukur dan terkoordinir dalam pengurangan risiko bencana.
  - b. Diselenggarakannya mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana yang disusun bersama oleh para pemangku kepentingan yang ada di daerah.
  - c. Membentuk lembaga penjamin stabilitas kegiatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan pemerintah dengan dunia usaha.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Berdasarkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2018-2023 yaitu **“UNTUK KEJAYAAN PADANG PANJANG YANG BERMARWAH DAN BERMARTABAT”** dengan **3 (tiga) Misi**, maka misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang adalah **pilar ke-4** yaitu **“Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan**, dengan misi ke-1 **“Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan”** dengan kebijakan “peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam” Di samping itu kebijakan khusus di bidang politik yaitu menciptakan suasana politik yang kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat dan memberikan ruang yang lebih luas kepada partai politik, LSM/NGO, interest group untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem politik yang sehat di Kota Padang Panjang.

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Padang Panjang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat dan mengakomodir visi, misi Kepala Daerah terpilih tahun 2018-2023.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang**

<b>Visi :</b> Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat				
<b>Pilar 4 :</b> Pelayanan Umum dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				
<b>Misi ke-1 :</b> Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan				
<b>Tujuan</b> Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana				
<b>Indikator</b> Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP				
Target Tahun Ke				
2019	2020	2021	2022	2023
90%	93%	96%	98%	100%

Tujuan/sasaran dan indikator tersebut dalam rentang waktu 2019 sampai dengan 2023 ditargetkan dapat diwujudkan dalam bentuk meningkatnya manajemen penanggulangan bencana dan meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat. Kinerja program dan kegiatan penanggulangan bencana serta kesatuan bangsa dan politik yang merupakan wujud pencapaian visi, misi serta program kerja Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang periode 2018-2023 tidak mungkin terlepas dari berbagai faktor penghambat dan pendorong.

### **Faktor Penghambat**

#### **a. Internal**

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang baik secara kuantitas maupun kualitas serta keterbatasan sumberdaya peralatan pendukung
2. Keterbatasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) adaptasi dan mitigasi bencana khususnya yang berkaitan langsung dengan adaptasi dan mitigasi bencana non struktur



3. Rendahnya pemahaman tentang kesiapsiagaan dan kemampuan untuk penanganan darurat bencana
4. Fokus pelayanan penanggulangan bencana yang terpusat pada pembangunan dan pengadaan sarana prasarana, rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana fisik pasca bencana yang cenderung mengabaikan dimensi sosial, budaya dan ekonomi
5. Keterbatasan alokasi anggaran dalam upaya pengurangan risiko bencana
6. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas baik dalam bidang penanggulangan bencana maupun kesatuan bangsa dan politik

**b. Eksternal**

1. Keterbatasan dukungan anggaran untuk pengurangan risiko bencana baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (fenomena lingkaran setan)
2. Lemahnya semangat pengarusutamaan pelaksanaan program pengurangan risiko bencana pada berbagai OPD terkait lainnya
3. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan politik masyarakat, sosial, ekonomi serta keamanan dan ketertiban

**Faktor Pendorong**

- a. Dalam situasi perubahan iklim yang sudah terjadi, kinerja program penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik Kota Padang Panjang yang bermuara pada penurunan risiko bencana dan sekaligus peningkatan kapasitas ketahanan daerah menjadi isu strategis pelaksanaan pembangunan
- b. Menguatnya kesadaran para pihak tentang pengurangan risiko bencana dalam pembangunan yang berlandaskan kesadaran pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang rendah emisi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

- c. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilukada serentak.
- d. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sumatera Barat, Renstra BNPB**

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian dan Lembaga, Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesbangpol juga disusun dengan memperhatikan visi dan misi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Visi Ditjen Politik dan Purn Kemendagri adalah :

**TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA MELALUI  
SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS DALAM WADAH NKRI**

Misi Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri adalah :

1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI
2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam wadah NKRI
3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan warga negara dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya bagi penguatan integrasi sosial.

Berdasarkan Renstra BPBD Provinsi Sumbar 2016-2021, maka yang menjadi prioritas di Provinsi Sumbar adalah :

1. Bencana cuaca ekstrim, banjir, letusan gunung api, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, dan kekeringan karena potensi terjadinya cenderung meningkat dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi
2. Gempa bumi dan tsunami karena potensi terjadinya cenderung tetap dan risiko yang timbul tergolong kategori tinggi

Sedangkan bencana lainnya seperti gelombang ekstrim dan abrasi, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi dan konflik sosial tidak menjadi bencana prioritas namun akan menjadi tugas kab/kota untuk melakukan penanganan daerah masing-masing yang terkena dampak langsung dari bencana tersebut.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan sejumlah peraturan terkait penanggulangan bencana diantaranya :

1. Perda nomor 5 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana
2. Perda nomor 9 tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Provinsi Sumbar
3. Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Prov Sumbar Tahun 2012-2016

Tujuan strategis BPBD Provinsi Sumbar yang termuat dalam RPJMD Prov Sumbar Tahun 2016-2021 adalah :

1. Mewujudkan pelayanan aparaturnya yang profesional
2. Meningkatkan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
3. Meningkatkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
4. Meningkatkan evakuasi korban penanggulangan bencana
5. Meningkatkan pemulihan daerah terdampak bencana

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang meliputi:

- a. Peningkatan pusat-pusat pelayanan kegiatan yang merata dan berhirarki sebagai perwujudan kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh kawasan;
- c. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- d. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung;
- e. Perwujudan kawasan budi daya yang berbasis mitigasi bencana
- f. Perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagai kota tujuan pendidikan, kesehatan dan wisata yang Islami;
- g. Perwujudan kawasan perkotaan yang didukung oleh perekonomian berbasis masyarakat;
- h. Pengendalian perkembangan kawasan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. Perwujudan kawasan strategis wilayah kota; dan
- j. Pengendalian fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan mempedomani kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat tersebut, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam

menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2018-2023) adalah sebagai berikut

1. Menciptakan keterpaduan dan kesatuan gerak/sinergi seluruh stakeholder dalam upaya penanggulangan bencana
2. Meningkatkan kualitas aparatur BPBD Kesbangpol dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, khususnya bidang penanggulangan bencana
3. Memaksimalkan ketersediaan dan penataan peralatan, penyimpanan dan logistik kebencanaan
4. Dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana
5. Menyediakan dokumen-dokumen Rencana penanggulangan bencana
6. Mengoptimalkan pemahaman, pengetahuan dan implementasi stakeholder terhadap kebencanaan
7. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam menjaga stabilitas daerah di kota Padang Panjang
8. Mengoptimalkan penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang
9. Meningkatkan rasa nasionalisme, wawasan kebangsaan dan bela negara

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Adapun yang menjadi tujuan dari BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang selama lima tahun 2018–2023 adalah :

**Tabel T-C.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kesbangpol**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi awal	Target Renstra BPBD Kesbangpol Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya manajemen penanganan bencana		Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	jml bencana yg tertangani secara cepat dan tepat / jml bencana x 100		90%	93%	96%	98%	100%
		Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat		10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit
2	Terwujudnya Stabilitas Daerah		Angka kejadian gangguan stabilitas daerah	jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu - jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun ini / jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu	10 kejadian	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	5 kejadian
		Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka kejadian konflik sosial	jml kejadian konflik sosial tahun lalu - jml kejadian konflik sosial tahun ini	6 konflik	5 konflik	4 konflik	3 konflik	3 konflik	3 konflik

**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kesbangpol harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Sementara itu kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

**Tabel T-C.26**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermarwah dan Bermartabat			
Misi 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Pembangunan Berkelanjutan			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana alam

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dengan ditetapkan strateginya pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Walikota/Wakil Walikota serta tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :



<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>
1	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat
2	Penyediaan Komponen dan Jasa listrik, air dan komunikasi
3	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan makanan dan minuman
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7	Penyediaan jasa tenaga administrasi teknis perkantoran
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor
3	Pengadaan Mebeleur
4	Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor
5	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>
1	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

<b>VI</b>	<b>Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>
1	Pelaksanaan Upaya pengurangan Resiko bencana
2	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana
3	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam
4	Penyusunan Kajian Resiko Bencana
5	Operasional Pusdalops
6	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dan Ancaman/Korban Bencana Alam
8	Verifikasi dan Validasi Kerusakanan dan Kerugian Pasca Bencana
9	Penyusunan (JITU PASNA, DALA HRNA dan PDNA)
10	Simulasi Penanggulangan Bencana
11	Penyusunan Kajian Resiko Bencana
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>
1	Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>
1	Kewaspadaan Dini
2	Pendidikan Wawasan Kebangsaan
3	Pemeliharaan Kerukunan Umat Bergama
4	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing
<b>IX</b>	<b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>
1	Operasional Pusdalops
2	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam

<b>X</b>	<b>Program Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>
1	Verifikasi dan validasi kerusakan dan kerugian pasca bencana
2	Standarisasi Penanganan Pasca Bencana
<b>XI</b>	<b>Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik</b>
1	Kewaspadaan Dini daerah
2	Pendidikan Wawasan Kebangsaan
3	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama
5	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing
6	Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial
7	Penyuluhan Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
8	Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
9	Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah
10	Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan
11	Fasilitasi penyelenggaran Pendidikan politik bagi pemilih pemula
12	Pembinaan Administrasi Bantuan Partai
13	Sosialisasi peraturan perundang-undangan
14	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
15	Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada

Dimana sumber pendanaan atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kota Padang Panjang.

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditunjukkan.

#### **Kinerja Kegiatan dikelompokkan ke dalam :**

1. Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan.
2. Kelompok indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non fisik berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah, outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Kelompok indikator benefits (manfaat) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
5. Kelompok indikator impacts (dampak) ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam setiap kegiatan.

Adapun indikator kinerja BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel T-C.28**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi kinerja awal RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	<b>Indikator Tujuan 1</b> Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	%	90%	90%	93%	96%	98%	100%	100%
2.	<b>Indikator Sasaran 1</b> Respon time Tanggap Darurat	menit	10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit	6 menit
3.	<b>Indikator Program</b> a. Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran	%	90%	90%	91%	92%	93%	94%	94%
	b. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

	c. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	c. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100%	100%					100%
	d. Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
	e. Kelurahan Tangguh Bencana	Kelurahan	2 Kelurahan	2 Kelurahan	8 Kelurahan	12 Kelurahan	14 Kelurahan	16 Kelurahan	16 Kelurahan
	e. Lama waktu pendistribusian logistik	Menit	20 menit	18 menit	17 menit	15 menit	13 menit	10 menit	10 menit
		Menit	180 menit	170 menit	160 menit	155 menit	150 menit	145 menit	140 menit
	g. Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jam			48 jam	48 jam	48 jam	48 jam	48 jam
4.	<b>Indikator Tujuan II</b> Angka kejadian gangguan stabilitas daerah	Kejadian	9 kejadian	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	5 kejadian	5 kejadian
5.	<b>Indikator Sasaran II</b> Angka kejadian konflik sosial	konflik	6 konflik	5 konflik	4 konflik	3 konflik	3 konflik	3 konflik	3 konflik
6.	<b>Indikator Program</b> - Persentase penanganan konflik sosial di Kota Padang Panjang - Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda - Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	60%	60%	70%	75%	80%	85%	85%
		Orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	250 orang
		Pemilu serentak	Pemilu serentak 71%	Pemilu serentak 71%	Pilgub 56%	-	-	Pilkada 73%	Pemilu serentak 71%, Pilgub

	dan Pemilu Kada								56%, Pilkada 73%
--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

**BAB VIII**  
**P E N U T U P**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan, Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang.

Renstra ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi semua personil dan pejabat BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang memberikan gambaran tentang kinerja pelayanan, isu-isu strategis yang perlu diselesaikan, penetapan visi, misi, tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan yang akan diambil dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tugas BPBD Kesbangpol dalam Penanggulangan Bencana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan baik.

Padang Panjang, Mei 2019

**Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah,  
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang Panjang**



**Drs. ERIZAL, M.Si**  
**NIP. 19630805 198603 1042**



**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kesbangpol**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Cara Pengukuran	Kondisi awal	Target Renstra BPBD Kesbangpol Tahun Ke				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana		Persentase penanganan bencana yang tertangani sesuai SOP	jml bencana yg tertangani secara cepat dan tepat / jml bencana x 100	90%	90%	93%	96%	98%	100%
		Meningkatnya respon penanganan bencana	Respon time Tanggap Darurat		10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit
2	Terwujudnya Stabilitas Daerah		Angka kejadian gangguan stabilitas daerah	jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu - jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun ini / jml kejadian gangguan stabilitas daerah tahun lalu	10 kejadian	9 kejadian	8 kejadian	7 kejadian	6 kejadian	5 kejadian
		Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	Angka kejadian konflik sosial	jml kejadian konflik sosial tahun lalu - jml kejadian konflik sosial tahun ini	6 konflik	5 konflik	4 konflik	3 konflik	3 konflik	3 konflik

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif  
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Meningkatnya respon penanganan bencana	5	01	01	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		90%	1.019.180.800	91%	952.850.200	92%	1.259.828.768	93%	1.385.811.645	94%	1.524.392.809		6.142.064.222			
		5	01	01	01	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Output	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alat tulis kantor dan cetak pengandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak pengandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja			433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak pengandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukur kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja	45.817.900	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak pengandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukur kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja	75.778.968	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak pengandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukur kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja	90.000.000	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak pengandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan pengukur kinerja, 4 dokumen laporan evaluasi renja	90.000.000	4 tahun	301.596.868	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
						Penyediaan jasa surat menyurat	Output	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat	3 jenis	3 jenis	2.600.000									1 tahun	2.600.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan	60 tagihan	60 tagihan	35.000.000										1 tahun	35.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
						Penyediaan alat tulis kantor	Output	Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa alat tulis kantor	30 jenis	30 jenis	25.000.000										1 tahun	25.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output	Jumlah jenis bahan pendukung barang cetak dan penggandaan	6 jenis	6 jenis	23.131.000										1 tahun	23.131.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output	jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis	10 jenis	6.000.000										1 tahun	6.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	01	02	Penyediaan Komponen dan Jasa listrik, air dan komunikasi	Output	Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan dan jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis, 60 tagihan	10 jenis, 60 tagihan		12 Bulan	43.900.000	12 Bulan	60.000.000	12 Bulan	65.000.000	12 Bulan	65.000.000	60 bulan	233.900.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	01	03	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan	Output	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 unit roda	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 unit roda		6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 unit roda	329.321.160	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda	440.912.400	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit	450.000.000	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit	519.392.809	5 Tahun	2.105.538.769	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD							
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp						
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5 01 01 01 04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output :	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 orang THL, 1 Tahun	4 orang THL, 1 Tahun	131.137.400	2 orang THL, 1 Tahun	82.651.140	2 orang THL, 1 Tahun	131.137.400	2 orang THL, 1 Tahun	150.000.000	2 orang THL, 1 Tahun	170.000.000	5 Tahun	664.925.940	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 01 08	Penyediaan makanan dan minuman	Output :	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	24 kali	24 kali	50.400.000	24 kali	47.560.000	24 kali	60.400.000	24 kali	75.000.000	24 kali	90.000.000	5 Tahun	323.360.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 01 09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output :	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	35 kali	35 kali	380.000.000	35 kali	342.000.000	35 kali	430.000.000	35 kali	480.811.645	35 kali	500.000.000	5 Tahun	2.132.811.645	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 01 10	Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran	Output :	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	2 orang THL			2 orang THL	61.600.000	2 orang THL	61.600.000	2 orang THL	75.000.000	2 orang THL	90.000.000	5 Tahun	288.200.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>212.500.000</b>	<b>90%</b>	<b>141.350.000</b>	<b>90%</b>	<b>314.825.000</b>	<b>90%</b>	<b>521.033.500</b>	<b>100%</b>	<b>1.264.708.500</b>					
		5 01 01 02 01	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Output :	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	15 unit kendaraan roda 2							4 kendaraan roda 2	200.000.000	1 kendaraan roda 4	350.000.000	100%	550.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02 02	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Output :	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit PC, 3 unit laptop, 3 unit printer, 40 meter			5 unit PC, 3 unit laptop, 3 unit printer	135.000.000	40 meter	36.600.000					100%	171.600.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02 04	Pengadaan Mebeleur	Output :	Jumlah mebeleur yang dibeli	30 buah kursi rapat, filling cabinet 3 buah							30 buah kursi rapat, filling cabinet 3 buah	60.000.000			100%	60.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02 05	Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	Output :	jumlah gedung kantor dan alat-alat kantor yang dipelihara	1 gedung dan 10 jenis			1 gedung dan 12 bulan	77.500.000	1 gedung dan 12 bulan	56.750.000	1 gedung dan 12 bulan	54.825.000	1 gedung dan 12 bulan	120.433.500	4 Tahun	309.508.500	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02	Pemeliharaan gedung kantor	Output :	jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	50.000.000									1 gedung	50.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02	Pemeliharaan peralatan kantor	Output :	jumlah alat-alat kantor yang dipelihara	10 jenis	10 jenis	25.000.000									10 jenis	25.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02 07	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output :	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	80 stel pakaian dinas					80 stel pakaian dinas	48.000.000			80 stel pakaian dinas	50.600.000	160 stel pakaian dinas	98.600.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01	<b>Program Peningkatan Disiplin aparatur</b>		<b>Persentase peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>46.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>	<b>-</b>	<b>90%</b>	<b>46.000.000</b>	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 02 07	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output :	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	80 stel pakaian dinas	80 stel pakaian dinas	46.000.000									80 stel pakaian dinas	46.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		5 01 01 03	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>		<b>99%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>99%</b>	<b>67.500.000</b>	<b>99%</b>	<b>90.750.000</b>	<b>99%</b>	<b>99.825.000</b>	<b>99%</b>	<b>109.807.500</b>	<b>99%</b>	<b>442.882.500</b>					
		5 01 01 03 01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output :	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	10 orang	10 orang	75.000.000	6 orang	67.500.000	6 orang	90.750.000	6 orang	99.825.000	6 orang	109.807.500	1 Tahun	442.882.500	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		5 01 01	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	Output : Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	1.500.000										100%	1.500.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
			Penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Output : Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah	100%	100%	500.000										100%	500.000		
			Penyusunan laporan kinerja keuangan perangkat daerah	Output : Jumlah laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD, laporan keuangan semesteran, laporan prognosis ralisasi anggaran dan laporan akhir tahun	100%	100%	1.000.000										100%	1.000.000		
		5 01 01 15	<b>Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>	Output : Kelurahan Tangguh Bencana	2 Kelurahan	2 kelurahan	1.756.381.000	8 kelurahan	394.380.500	12 kelurahan	428.318.550	14 kelurahan	412.000.000	16 kelurahan	400.000.000	16 kelurahan	3.391.080.050	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 15 01	Pelaksanaan Upaya pengurangan Resiko bencana	Output : Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan, jumlah masyarakat dan aparaturnya yang dilatih dan jumlah rambu-rambu bencana yang tersedia dan terpelihara	4 kali	4 kali, 140 orang	81.255.000	4 kali, 140 orang dan 1 paket	165.000.000	4 kali, 140 orang dan 1 paket	238.318.550	4 kali, 140 orang dan 1 paket	172.619.500	4 kali, 140 orang dan 1 paket	200.000.000	20 kali, 700 orang dan 5 paket	857.193.050	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 15 02	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	Output : Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Provinsi, Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana Tk.Kota	15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang	106.525.000	15 orang, 160 orang	150.000.000	15 orang, 160 orang	190.000.000	15 orang, 160 orang	180.000.000	15 orang, 160 orang	200.000.000	75 orang	826.525.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 15 04	Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam	Output : Jumlah masyarakat dan aparaturnya yang dilatih	160 orang	160 orang	149.260.000									160 orang	149.260.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 16 01	Operasional Pusdalops	Output : Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	22 orang	22 orang	927.766.000									22 orang	927.766.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 16 02	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Output : Jumlah kasus yang tangani	100 kasus	100 kasus	282.650.000									80 kasus	282.650.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 16 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	Output : Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis	20 jenis	148.875.000									20 jenis	148.875.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 17 01	Verifikasi dan validasi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Outcome : Jumlah kerusakan yang di verifikasi	50 kasus	50 kasus	16.475.000									50 kasus	16.475.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5 01 01 17 02	Penyusunan (JITU PSCA), (DALA), (HRNA) dan PDNA	Output : Jumlah anggota tim yang dilatih	40 orang	40 orang	43.575.000									40 orang	43.575.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 15 04	Simulasi Penanggulangan Bencana	Output : Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB		1500 Orang	59.380.500					1500 Orang	59.380.500			3000 orang	59.380.500	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 15 06	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Output : Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	-	-	-	1 dokumen	20.000.000							1 dokumen	20.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01	<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>	Jumlah penurunan angka penyakit masyarakat (kriminalitas, narkoba, psikotropika zat adiktif lainnya (Napza), Miras)	0	100%	116.730.000	-	-							100%	116.730.000		
		5 01 01 18 01	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Output : Jumlah peserta penyuluhan P4GN	0	50 orang	116.730.000									50 orang	116.730.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Persentase peningkatan dan pengembangan wawasan kebangsaan		100%	178.695.000	160 menit	-							1	178.695.000		
		5 01 01 18 02	Kewaspadaan Dini daerah	Output : Jumlah pertemuan tim yang dilaksanakan	12 kali	12 kali	18.400.000									12 kali	18.400.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 18 03	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Output : Jumlah kader wawasan kebangsaan yang dilatih	60 orang	60 orang	23.720.000									60 orang	23.720.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 18 04	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	Output : Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan	6 pertemuan	26.400.000									6 pertemuan	26.400.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 18 05	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	Output : Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/LSM	11 orang/LSM	110.175.000									11 orang/LSM	110.175.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 16	<b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>	Respon time tanggap darurat	20 menit	18 menit		17 menit	15 menit	13 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	5.140.539.000		
				Lama waktu pendistribusian logistik	180 menit	170 menit		160 menit	155 menit	150 menit	145 menit	145 menit	145 menit	145 menit	145 menit	145 menit	5.140.539.000		
		5 01 01 16 01	Operasional PUSDALOPS	Output : Jumlah anggota pusdalops yang melaksanakan operasional	22 orang			22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	3.711.064.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 16 02	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Output : Jumlah kasus yang tangani	100 kasus			95 kasus	282.650.000	90 kasus	282.650.000	85 kasus	282.650.000	80 kasus	282.650.000	80 kasus	1.130.600.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5 01 01 16 03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	Output : Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis			20 jenis	148.875.000			-	15 jenis	150.000.000	20 jenis	-	100%	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi					
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp			
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
		5	01	01	17	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</b> Penanganan dan Pasca	Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	48 jam	-	48 jam	62.500.000	48 jam	66.000.000	48 jam	69.000.000	48 jam	74.000.000	48 jam	271.500.000	-	-			
		5	01	01	17	01	Verifikasi dan validasi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Outcome :	Jumlah kerusakan yang di verifikasi	50 kasus		48 kasus	17.500.000	46 kasus	18.000.000	44 kasus	19.000.000	42 kasus	21.000.000	42 kasus	75.500.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	17	02	Standarisasi Penanganan Pasca Bencana	Output :	Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang dilaksanakan	1 dokumen, 40 orang, 1 kali		1 dokumen, 40 orang, 1 kali	45.000.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	48.000.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	50.000.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	53.000.000	5 dokumen, 200 orang, 5 kali	196.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
Terwujudnya Stabilitas Daerah	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	5	01	01	18	<b>Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik</b>	Persentase penanganan konflik sosial di Kelurahan	60%	60%	1.091.613.000	70%	999.053.363	75%	1.070.296.750	80%	1.156.202.425	85%	1.252.148.668	85%	5.569.314.206	-	-		
		5	01	01	18		Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	Output :	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang				
		5	01	01	18		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada	Output :	Pemilu serentak 71%	Pemilu serentak 71%		Pilgub 56%				Pilkada 73%				Pemilu serentak 71%, Pilgub 56%, Pilkada 73%				
		5	01	01	18	02	Kewaspadaan Dini daerah	Output :	Jumlah pertemuan tim yang dilaksanakan	12kali		12 kali	20.240.000	12 kali	22.264.000	12 kali	22.264.000	12 kali	22.264.000	48 kali	87.032.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18	03	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Output :	Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	50 orang		50 orang	26.092.000	50 orang	28.701.200	50 orang	28.701.200	50 orang	28.701.200	200 orang	112.195.600	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18	04	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	Output :	Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan		6 pertemuan	26.400.000	6 pertemuan	29.040.000	6 pertemuan	29.040.000	6 pertemuan	29.040.000	24 pertemuan	113.520.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18	05	Pengawasan Orang Asing NGO dan Lembaga Asing	Output :	Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/LSM		11 orang/LSM	71.192.500	11 orang/LSM	78.311.750	11 orang/LSM	164.217.425	11 orang/LSM	164.217.425	11 orang/LSM	477.939.100	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18	01	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Output :	Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang		50 orang	74.179.900	50 orang	152.841.277	50 orang	152.841.277	50 orang	152.841.277	200 orang	532.703.731	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18	06	Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	Output :	persentase konflik sosial yang tertangani	90%	60%	572.175.000	70%	321.778.800	75%	353.956.680	80%	353.956.680	85%	353.956.680	90%	1.955.823.840	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	07	Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	Output :	Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan pertemuan Akbar	7 kali 50 org	7 kali 50 org	300.275.000	7 kali 50 org	246.224.800	7 kali 50 org	358.529.305	7 kali 50 org	358.529.305	7 kali 50 org	279.910.548	35 kali, 250 orang	1.543.468.958	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	08	Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan	Output :	Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola	55 ormas	55 ormas	20.955.000	55 ormas dan kantor bersama	23.050.500	55 ormas dan kantor bersama	25.355.550	55 ormas dan kantor bersama	25.355.550	55 ormas dan kantor bersama	25.355.550	55 ormas dan kantor bersama	120.072.150	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	10	Fasilitasi penyelenggaran Pendidikan politik bagi pemilih pemula	Output :	Jumlah pemilih yang dididik	100 orang	100 orang	40.650.000	100 orang	17.000.000				100 orang	17.000.000	300 orang	74.650.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18	11	Pembinaan Administrasi Bantuan Partai	Output :	Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	9 parpol	14 parpol	20.470.000	14 parpol	21.000.000	14 parpol	21.296.988	14 parpol	21.296.988	14 parpol	21.296.988	14 parpol	105.360.964	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Output :	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	50 orang	27.565.000	50 orang	10.000.000				50 orang	27.565.000	150 orang	65.130.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		5	01	01	18	13	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Output : Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif	3 bulan	3 bulan	109.523.000		32.371.863						3 tahun	141.894.863	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18		Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada	Output : Lama pemantauan pelaksanaan pilkada		3 bulan	109.523.000					3 bulan	130.000.000	3 tahun	239.523.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
<b>Jumlah total/tahun</b>										<b>4.360.099.800</b>		<b>4.048.075.063</b>		<b>4.266.960.068</b>		<b>4.798.080.070</b>		<b>5.091.798.477</b>		<b>22.565.013.478</b>		

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator  
BPBD, Kesbangpol Kota Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatnya manajemen penanggulangan bencana	Meningkatnya respon penanganan bencana	5010101	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Persentase aparatur internal OPD yang menyatakan puas atas pelayanan administrasi perkantoran		90%	1.019.180.800	91%	952.850.200	92%	1.259.828.768	93%	1.385.811.645	94%	1.524.392.809		6.142.064.222				
		501010101	Pengadaan cetak dokumen dan jasa surat menyurat	Output : Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan jasa surat menyurat, jumlah alat tulis kantor dan jumlah barang cetak dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan kinerja daerah	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan kinerja, 4 dokumen evaluasi renja		50.731.000	45.817.900	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan kinerja, 4 dokumen evaluasi renja	433 lembar meterai 6000, 3000, 30 jenis atk dan cetak penggandaan selama 12 bulan, 20 laporan, 6 dokumen perencanaan, 12 dokumen laporan bulanan, 4 dokumen laporan kinerja, 4 dokumen evaluasi renja	75.778.968	90.000.000	90.000.000	90.000.000	5 tahun	352.327.868	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		501010102	Penyediaan Komponen dan Jasa listrik, air dan komunikasi	Output : Jumlah tagihan rekening yang dibayarkan dan jumlah jenis komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	10 jenis, 60 tagihan	10 jenis, 60 tagihan	41.000.000	43.900.000	10 jenis, 60 tagihan	60.000.000	10 jenis, 60 tagihan	65.000.000	65.000.000	65.000.000	60 bulan	274.900.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			
		501010103	Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	365.912.400	329.321.160	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	6 unit roda 4, 12 unit roda 2,1 unit roda 6, 3 orang THL	440.912.400	450.000.000	450.000.000	519.392.809	5 Tahun	2.105.538.769	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang			



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		5 01 01 01 04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Output :	Jumlah unit gedung kantor yang dijaga dan dibersihkan	2 orang THL, 1 Tahun	4 orang THL, 1 Tahun	131.137.400	2 orang THL, 1 Tahun	82.651.140	2 orang THL, 1 Tahun	131.137.400	2 orang THL, 1 Tahun	150.000.000	2 orang THL, 1 Tahun	170.000.000	5 Tahun	664.925.940	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 01 08	Penyediaan makanan dan minuman	Output :	Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan	24 kali	24 kali	50.400.000	24 kali	47.560.000	24 kali	60.400.000	24 kali	75.000.000	24 kali	90.000.000	5 Tahun	323.360.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 01 09	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Output :	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	35 kali	35 kali	380.000.000	35 kali	342.000.000	35 kali	430.000.000	35 kali	480.811.645	35 kali	500.000.000	5 Tahun	2.132.811.645	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 01 10	Penyediaan jasa tenaga administrasi perkantoran	Output :	Jumlah tenaga administrasi yang dipekerjakan	2 orang THL			2 orang THL	61.600.000	2 orang THL	61.600.000	2 orang THL	75.000.000	2 orang THL	90.000.000	5 Tahun	288.200.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>90%</b>	<b>121.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>212.500.000</b>	<b>90%</b>	<b>141.350.000</b>	<b>90%</b>	<b>314.825.000</b>	<b>90%</b>	<b>521.033.500</b>	<b>100%</b>	<b>1.310.708.500</b>			
		5 01 01 02 01	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Output :	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	15 unit kendaraan roda 2							4 kendaraan roda 2	200.000.000	1 kendaraan roda 4	350.000.000	100%	550.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 02 02	Pengadaan peralatan dan Perlengkapan gedung kantor	Output :	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	5 unit PC, 3 unit laptop, 3 unit printer, 40 meter			5 unit PC, 3 unit laptop, 3 unit printer	135.000.000	40 meter	36.600.000					100%	171.600.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 02 04	Pengadaan Mebeleur	Output :	Jumlah mebeleur yang dibeli	30 buah kursi rapat, filling cabinet 3 buah							30 buah kursi rapat, filling cabinet 3 buah	60.000.000			100%	60.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 02 05	Pemeliharaan gedung dan peralatan kantor	Output :	jumlah gedung kantor dan alat-alat kantor yang dipelihara	1 gedung dan 10 jenis		75.000.000	1 gedung dan 12 bulan	77.500.000	1 gedung dan 12 bulan	56.750.000	1 gedung dan 12 bulan	54.825.000	1 gedung dan 12 bulan	120.433.500	4 Tahun	384.508.500	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 02 07	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output :	Jumlah stel pakaian dinas dan perlengkapan yang diadakan	80 stel pakaian dinas	80 stel pakaian dinas	46.000.000			80 stel pakaian dinas	48.000.000			80 stel pakaian dinas	50.600.000	160 stel pakaian dinas	144.600.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 03	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur</b>		<b>99%</b>	<b>75.000.000</b>	<b>99%</b>	<b>67.500.000</b>	<b>99%</b>	<b>90.750.000</b>	<b>99%</b>	<b>99.825.000</b>	<b>99%</b>	<b>109.807.500</b>	<b>99%</b>	<b>442.882.500</b>			
		5 01 01 03 01	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Output :	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	10 orang	10 orang	75.000.000	6 orang	67.500.000	6 orang	90.750.000	6 orang	99.825.000	6 orang	109.807.500	1 Tahun	442.882.500	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 15	<b>Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>		<b>Kelurahan Tangguh Bencana</b>	2 Kelurahan	2 Kelurahan	337.040.000	8 Kelurahan	394.380.500	12 Kelurahan	428.318.550	14 Kelurahan	412.000.000	16 Kelurahan	400.000.000	16 Kelurahan	1.971.739.050	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 15 01	Pelaksanaan Upaya pengurangan Resiko bencana	Output :	Jumlah upaya mitigasi yang dilakukan, jumlah masyarakat dan aparat yang dilatih dan jumlah rambu-rambu bencana yang tersedia dan terpelihara	4 kali	4 kali, 140 orang	81.255.000	4 kali, 140 orang dan 1 paket	165.000.000		238.318.550	4 kali, 140 orang dan 1 paket	172.619.500	4 kali, 140 orang dan 1 paket	200.000.000	20 kali, 700 orang dan 5 paket	857.193.050	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5 01 01 15 02	Pencegahan dini dan penanggulangan bencana melalui jambore pengurangan resiko bencana	Output :	Jumlah peserta jambore pengurangan resiko bencana	15 orang, 160 orang	15 orang, 160 orang	106.525.000	15 orang, 160 orang	150.000.000	15 orang, 160 orang	190.000.000	15 orang, 160 orang	180.000.000	15 orang, 160 orang	200.000.000	75 orang	826.525.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	

Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
										Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		5	01	01	15	04	Simulasi Penanggulangan Bencana	Output :	Jumlah orang yang mendapat mengikuti simulasi PB			1500 Orang	59.380.500			1500 Orang	59.380.500			3000 orang	59.380.500	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	15	06	Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Output :	Jumlah dokumen Kajian Resiko Bencana	-	-	1 dokumen	20.000.000							1 dokumen	20.000.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	16		<b>Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana</b>		Respon time tanggap darurat	20 menit	18 menit	1.339.291.000	17 menit	1.359.291.000	15 menit	1.210.416.000	13 menit	1.360.416.000	10 menit	1.210.416.000	10 menit	6.479.830.000		
						Lama waktu pendistribusian logistik		180 menit	170 menit	160 menit	155 menit		150 menit		145 menit		145 menit							
		5	01	01	16	01	Operasional PUSDALOPS	Output :	Jumlah anggota yang melaksanakan operasional	22 orang	22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	927.766.000	22 orang	4.638.830.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	16	02	Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Output :	Jumlah kasus yang tangani	100 kasus	100 kasus	262.650.000	95 kasus	282.650.000	90 kasus	282.650.000	85 kasus	282.650.000	80 kasus	282.650.000	80 kasus	1.393.250.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	16	03	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam	Output :	Jumlah/jenis sarana dan prasarana evakuasi penduduk dan ancaman/korban bencana alam yang diadakan	20 jenis	20 jenis	148.875.000	20 jenis	148.875.000		-	15 jenis	150.000.000	20 jenis	-	100%	148.875.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output) Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi				
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp		
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
		5	01	01	17	<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana</b> Penanganan dan Pasca	Lama waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	48 jam		60.050.000	48 jam	62.500.000	48 jam	66.000.000	48 jam	69.000.000	48 jam	74.000.000	48 jam	331.550.000	-	-	
		5	01	01	17	01	Verifikasi dan validasi kerusakan dan kerugian pasca bencana	Output : Jumlah kerusakan yang di verifikasi	50 kasus	50 kasus	16.475.000	48 kasus	17.500.000	46 kasus	18.000.000	44 kasus	19.000.000	42 kasus	21.000.000	42 kasus	91.975.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	17	02	Standarisasi Penanganan Pasca Bencana	Output : Jumlah dokumen yang di susun , Jumlah anggota tim yang dilatih, pembinaan yang dilaksanakan	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	43.575.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	45.000.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	48.000.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	50.000.000	1 dokumen, 40 orang, 1 kali	53.000.000	5 dokumen, 200 orang, 5 kali	239.575.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
Terwujudnya Stabilitas Daerah	Meningkatnya kualitas keamanan dan kerukunan hidup di masyarakat	5	01	01	18	<b>Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik</b>	Persentase penanganan konflik sosial di Kelurahan	60%	60%	1.387.038.000	70%	966.681.500	75%	1.070.296.750	80%	1.156.202.425	85%	1.252.148.668	85%	5.832.367.343	-	-	
		5	01	01	18		Jumlah Peningkatan Wawasan Kebangsaan Generasi Muda	50 orang	50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		50 orang		250 orang				
		5	01	01	18		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pemilu Kada	Pemilu serentak 71%	Pemilu serentak 71%		Pilgub 56%					Pilkada 73%		Pemilu serentak 71%, Pilgub 56%, Pilkada 73%					
		5	01	01	18	02	Kewaspadaan Dini daerah	Output : Jumlah pertemuan tim yang dilaksanakan	12kali	12kali	18.400.000	12 kali	20.240.000	12 kali	22.264.000	12 kali	22.264.000	12 kali	22.264.000	48 kali	105.432.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	03	Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Output : Jumlah kader wawasan kebangsaan yang di latih	50 orang	50 orang	23.720.000	50 orang	26.092.000	50 orang	28.701.200	50 orang	28.701.200	50 orang	28.701.200	200 orang	135.915.600	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	04	Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama	Output : Jumlah pertemuan FKUB yang di adakan	6 pertemuan	6 pertemuan	26.400.000	6 pertemuan	26.400.000	6 pertemuan	29.040.000	6 pertemuan	29.040.000	6 pertemuan	29.040.000	24 pertemuan	139.920.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	05	Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Output : Jumlah orang asing/LSM yang di awasi	11 orang/LSM	11 orang/LSM	110.175.000	11 orang/LSM	71.192.500	11 orang/LSM	78.311.750	11 orang/LSM	164.217.425	11 orang/LSM	164.217.425	11 orang/LSM	588.114.100	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	01	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Output : Jumlah peserta penyuluhan P4GN	50 orang	50 orang	116.730.000	50 orang	74.179.900	50 orang	152.841.277	50 orang	152.841.277	50 orang	152.841.277	200 orang	649.433.731	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	06	Pelaksana Koordinasi Penanganan konflik Sosial	Output : persentase konflik sosial yang tertangani	90%	60%	572.175.000	70%	321.778.800	75%	353.956.680	80%	353.956.680	85%	353.956.680	90%	1.955.823.840	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	07	Pelaksana Forum Koordinasi dan Diskusi Stabilitas Daerah	Output : Jumlah forum koordinasi yang dilaksanakan dan pertemuan Akbar	7 kali 50 org	7 kali 50 org	300.275.000	7 kali 50 org	246.224.800	7 kali 50 org	358.529.305	7 kali 50 org	358.529.305	7 kali 50 org	279.910.548	35 kali, 250 orang	1.543.468.958	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	08	Pembinaan, Pengawasan dan pengelolaan organisasi kemasyarakatan	Output : Jumlah ormas yang dibina dan jumlah kantor bersama yang dikelola	55 ormas	55 ormas	20.955.000	55 ormas dan kantor bersama	23.050.500	55 ormas dan kantor bersama	25.355.550	55 ormas dan kantor bersama	25.355.550	55 ormas dan kantor bersama	25.355.550	55 ormas dan kantor bersama	120.072.150	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	10	Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan politik bagi pemilih pemula	Output : Jumlah pemilih yang dididik	100 orang	100 orang	40.650.000	100 orang	17.000.000					100 orang	17.000.000	300 orang	74.650.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	11	Pembinaan Administrasi Bantuan Partai	Output : Jumlah partai peserta pemilu yang dibina	9 parpol	14 parpol	20.470.000	14 parpol	21.000.000	14 parpol	21.296.988	14 parpol	21.296.988	14 parpol	21.296.988	14 parpol	105.360.964	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang
		5	01	01	18	12	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Output : Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	50 orang	27.565.000	50 orang	10.000.000					50 orang	27.565.000	150 orang	65.130.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang

Tujuan	Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
								Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
		5	01	01	18	13	Pemantauan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	Output : Lama pemantauan pelaksanaan pilpres, walpres dan legislatif	3 bulan	3 bulan	109.523.000							3 tahun	109.523.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
		5	01	01	18		Pemantauan Pelaksanaan Pemilukada	Output : Lama pemantauan pelaksanaan pilkada		3 bulan	109.523.000					3 bulan	130.000.000	3 tahun	239.523.000	BPBD, Kesbangpol	Padang Panjang	
<b>Jumlah total/tahun</b>										<b>4.338.599.800</b>		<b>4.015.703.200</b>		<b>4.266.960.068</b>		<b>4.798.080.070</b>		<b>5.091.798.477</b>		<b>22.511.141.615</b>		